

**KUMPULAN MAKALAH DAN SAMBUTAN  
MENTERI MUDA PERTANIAN**

*TENTANG*

**AGRO-INDUSTRI DAN AGRIBISNIS**

**DEPARTEMEN PERTANIAN**



PENGANTAR DISKUSI MENGENAI :  
**RENCANA PEMBANGUNAN AGRIBISNIS DALAM  
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHAP KEDUA**

Oleh :  
Sjarifudin Baharsjah

Departemen Pertanian  
1991



PENGANTAR DISKUSI MENTERI MUDA PERTANIAN  
MENGENAI RENCANA PEMBANGUNAN AGRIBISNIS DALAM  
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHAP KEDUA

Pendahuluan

Pembangunan pada dasarnya merupakan suatu proses perubahan ekonomi dan sosial masyarakat yang berkelanjutan. Dalam rangka era lepas landas ini, pertanian masih merupakan salah satu sektor tumpuan yang diharapkan dalam proses pertumbuhannya dapat menyerap tenaga kerja yang besar. Sangat disadari kendatipun bahwa telah menurun menjadi sekitar 1.97% per tahun perkembangan penduduk masih akan membawa dampak yang cukup besar terhadap tambahan jumlah angkatan kerja. Dalam Pelita V ini, sektor pertanian diharapkan menyerap tenaga kerja lebih dari 4 juta jiwa. Ini merupakan tantangan yang cukup besar, mengingat luas lahan yang dapat dikembangkan, terutama yang berada di wilayah Indonesia Bagian Barat, kiranya akan semakin terbatas kemampuannya untuk menampung tambahan jumlah angkatan kerja tersebut secara produktif.



Mengambil acuan yang telah ditetapkan dalam GBHN 1988 bahwa prioritas pembangunan diletakkan pada bidang ekonomi dengan titik berat pada sektor pertanian dan sektor industri dalam rangka mewujudkan struktur ekonomi yang seimbang antara industri dan pertanian, baik dalam nilai tambah maupun dari segi penyerapan tenaga kerja, maka pengembangan sektor pertanian akan memiliki pengaruh yang sangat mendasar, baik dari aspek pembangunan pertanian itu sendiri, dari sektor lain yang terkait dalam pembangunan pertanian seperti sektor industri maupun pada stabilitas pembangunan nasional itu sendiri.

Banyak hal kiranya perlu dikaji lebih lanjut dalam menghadapi masalah ini. Pembangunan sarana dan prasarana yang memadai haruslah menjadi bahan pemikiran awal, karena tanpa kedua-duanya, produk pertanian diperkirakan tidak akan mampu terus berkembang secara berkelanjutan. Hal ini tentu saja berkaitan erat dengan masyarakat yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam sektor pertanian.

Secara umum, kendala yang masih nampak dalam upaya pengembangan sektor agribisnis ini antara lain adalah skala usahatani yang relatif masih kecil; kualitas dan kuantitas produksi, serta pemodalan yang juga masih sangat terbatas. Keterbatasan ini menimbulkan berbagai permasalahan dalam hal pengelolaan sarana, prasarana maupun penanganan pasca panennya. Selain itu, jumlah angkatan kerja yang secara potensial berkualitas untuk mengisi lapangan kerja di bidang pertanian, secara relatif justru cenderung beralih ke sektor lainnya yang diharapkan dapat memberikan penghasilan lebih baik.



Mengingat bahwa sektor pertanian merupakan sektor kegiatan utama baik di wilayah Indonesia Bagian Barat maupun di Indonesia Bagian Timur, maka pemerintah sangat menaruh perhatian pada setiap upaya yang dilakukan guna memacu pengembangan agribisnis.

Dalam kaitan ini, pengembangan teknologi sebelum tanam hingga lepas panen (pasca panen) adalah salah satu upaya yang perlu terus ditingkatkan guna menunjang keberhasilan pengembangan agro-industri dan agribisnis di Indonesia.

Arah pembangunan yang bertumpu pada Trilogi Pembangunan mengamanatkan bahwa setiap usaha peningkatan produksi sekaligus harus terkait dengan peningkatan pendapatan petani. Peningkatan pendapatan petani dilakukan melalui penanganan dua sisi secara simultan yaitu peningkatan produksi dan produktivitas usaha tani (melalui diversifikasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan rehabilitasi) serta peningkatan nilai tambah dari produk yang dihasilkan. Pendekatan pembangunan seperti ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di lokasi spesifik di pedesaan tersebut sekaligus dapat memacu proses interaksi ekonomi antar desa, antar desa dan kota, antar wilayah dan bahkan antar negara.

Kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan antar wilayah dan antar sektor ekonomi merupakan dua isu penting yang harus dipecahkan sekaligus mulai Repelita V ini, menuju terciptanya landasan yang kokoh untuk proses tinggal landas mulai Repelita. Tanpa adanya upaya yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja sektor pertanian dan



pedesaan mendekati yang dicapai oleh sektor ekonomi lainnya maka sektor pertanian dan pedesaan akan tidak dapat turut serta tinggal landas, malah akan dapat menghambat upaya bangsa untuk tinggal landas. Saat ini potensi sektor pertanian yang sangat besar sebagai pasar produk sektor ekonomi lainnya belum dimanfaatkan secara optimal karena tingkat pendapatan pada sektor pertanian ini masih rendah.

Peningkatan pendapatan sektor pertanian merupakan salah satu faktor kunci untuk mendorong pertumbuhan sektor ekonomi lainnya. Pola konsumsi sektor pertanian dan pedesaan ini mempunyai komponen impor yang sangat rendah, oleh karena itu, peningkatan pendapatan sektor pertanian dan pedesaan akan meningkatkan permintaan terhadap produk sektor ekonomi lainnya secara sangat berarti.

Sektor agro-industri yang dikembangkan di sentra produksi pertanian berdampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja pedesaan dan pemerataan pendapatan. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa sekitar 60 persen nilai tambah sektor agro-industri di pedesaan sekitar 60 persen dialokasikan pada upah. Sebaliknya, industri di perkotaan hanya mengalokasikan nilai tambah untuk gaji/upah di bawah 30 persen, karena corak investasinya yang padat modal.

Pertumbuhan agro-industri yang optimal hanya mungkin terwujud manakala perwilayahan pengembangan komoditi didasarkan atas azas keunggulan komparatif regional serta pembangunan



industri pengolahannya memenuhi skala ekonomi serta mampu mengendalikan produk yang secara kontinu. Investasi seperti ini harus dapat disertai oleh investasi pemerintah pada sarana dan prasarana ekonomi serta utilitas umum pada sentra produksi pertanian bersangkutan.

Investasi sektor pemerintahan (public) lainnya adalah pada penelitian dan pengembangan komoditi pertanian secara berkesinambungan.

Pengamatan terhadap perkembangan sektor pertanian menunjukkan bahwa selama ini komposisi ekspor hasil pertanian masih lebih berat kepada bahan mentah dan dikelola dalam bentuk yang lebih merupakan enklave ekonomi. Kita merasa yakin bahwa melalui pengembangan agro-industri dari skala kecil maupun skala menengah di pedesaan, akan tercipta mata rantai pengolahan dalam negeri yang memberikan dampak positif terhadap usaha-usaha peningkatan nilai tambah, peningkatan pendapatan petani dan pengrajin, perluasan kesempatan berusaha serta menciptakan tambahan lapangan kerja. Kesemua ini akan menimbulkan berbagai dampak positif kepada, antara lain : (1) Percepatan pembangunan perekonomian pedesaan; (2) Penopangan pergeseran tata-nilai masyarakat pedesaan menuju terbentuknya masyarakat industri dalam arti luas; (3) Terbentuknya kemampuan agro-industri dalam negeri yang makin tangguh dan yang dapat memanfaatkan potensi pasar domestik maupun peluang pasar ekspor; (4) Terciptanya momentum



dan kemampuan nasional untuk lebih mempercepat proses industrialisasi sebagai akibat semakin meluasnya kesempatan kerja dan daya beli masyarakat pedesaan; dan (5) Meningkatnya ketahanan masyarakat pedesaan secara luas.

### Ruang Lingkup Pengembangan Agribisnis

Ruang gerak agribisnis paling tidak meliputi tiga aspek :  
(1) Aspek pengelolaan usaha pertanian yang meliputi pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan. (2) Aspek produk penunjang kegiatan pra dan pasca panen seperti industri penghasil pupuk dan alat mekanisasi pertanian, pestisida, bibit unggul, serta (3) Aspek sarana jasa penunjang seperti perbankan, sarana tataniaga, dan penyuluhan petani khususnya yang menopang kegiatan agribisnis.

Indonesia adalah negara agraris yang hampir 75 % tanahnya dikelola untuk pertanian. Mengingat masih banyaknya masyarakat yang tinggal di pedesaan ( 80 persen) dan besarnya tenaga kerja yang bekerja di bidang pertanian ( 50 persen), maka kebijaksanaan pembangunan yang berorientasi ke pedesaan merupakan kebijaksanaan sentral yang harus tetap dipertahankan. Kebijakan lainnya yang terus diupayakan adalah melakukan deregulasi tataniaga komoditi pertanian/pemasaran hasil-hasil produksi di dalam mata rantai agribisnis sektor pertanian.



Dalam struktur perekonomian Nasional, sektor agribisnis memiliki jangkauan yang sangat luas, yaitu dari skala usahatani yang dikelola keluarga hingga skala usahatani di tingkat nasional. Selain itu, agribisnis juga mencakup keterkaitan antara sektor pertanian dengan sektor industri hingga seluruh jaringan sistem pertanian dimulai dari pengorganisasian produksi hingga kepada pendistribusian hasil produksi. Oleh karena itu, perlu kiranya dikaji lebih lanjut sektor-sektor pertanian yang terkait dengan sektor industri atau sebaliknya.

Sektor industri pengolahan yang relatif padat modal umumnya sangat erat keterkaitannya dengan sektor pertanian, yang bertindak sebagai pemasok bahan baku. Di lain pihak, hasil-hasil pertanian yang dapat diterima oleh sektor industri pengolahan untuk diolah lebih lanjut, perlu memenuhi beberapa kriteria baik dalam segi kualitas maupun kuantitas. Segi kualitas ini diperlukan untuk menjamin mutu barang olahan yang layak pakai dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan industri, sedangkan segi kuantitas dibutuhkan untuk menjaga kesinambungan produksi. Laju pertumbuhan industri pengolahan yang cukup pesat selama ini, yaitu sekitar 28.38 % setahun, tentunya membutuhkan bahan baku dalam jumlah yang sangat besar. Dalam kondisi yang demikian itulah sektor pertanian diharapkan mampu merangsang pihak swasta untuk menanamkan modalnya sedemikian rupa sehingga membangkitkan arus pendapatan tinggi dan menjangkau segala pelaku serta memiliki keunggulan bersaing yang tinggi pula. Disamping itu,



karena agribisnis dapat meningkatkan dan merangsang penanaman modal dan merupakan suatu usaha yang sumberdayanya dapat senantiasa diperbarui (renewable), maka agribisnis merupakan salah satu sektor dengan prospek yang cukup menarik.

Untuk menjamin keberlangsungan produksi pertanian, pengembangan teknologi di bidang budidaya pertanian harus terus digalakkan. Di sektor produksi ini tidak hanya dibutuhkan modal saja, tetapi juga sektor penelitian dan pengembangan pertanian. Peran swasta semakin terlihat dalam penanaman modal di bidang pertanian, sementara peran pemerintah semakin berkurang. Namun demikian, dalam bidang penelitian dan pengembangan budidaya pertanian, peranan pemerintah masih cukup besar, walaupun dari pihak swastapun mulai berminat dalam bidang ini. Pemerintah melalui berbagai lembaga-lembaga penelitian senantiasa berupaya memperkenalkan penemuan-penemuan baru di bidang perekayasaan budidaya pertanian. Peranan swasta dalam penelitian dan pengembangan ini akan cukup besar dan potensi ini perlu dimanfaatkan dan diarahkan secara berencana.

### Mata Rantai Agribisnis di Indonesia

Pola dan hubungan keterkaitan seluruh mata rantai agribisnis di dalam negeri dewasa ini pada umumnya belum optimal dan masih dilandasi oleh ekonomi biaya tinggi. Keadaan ini antara lain disebabkan : (1) pada sebagian besar komoditi pertanian pola produksi belum dalam satu areal yang kompak berkelompok sehingga



skala ekonomi daerah belum efisien; (2) sarana dan prasarana ekonomi yang belum memadai untuk daerah produksi tersebut; (3) pola agro industri yang terpusat bukan di sentra produksi di pedesaan tetapi diperkotaan; (4) biaya transportasi yang relatif lebih tinggi; dan (5) sistem kelembagaan yang belum mendukung dengan peranan petani produsen masih lemah, dengan informasi pasar yang belum memadai.

Pola dan sifat keterkaitan seluruh mata rantai agribisnis ini belum berada dalam tingkat yang efisien dan optimal. Untuk menserasikan hubungan ini perlu dikembangkan paket teknologi spesifik untuk setiap wilayah/sentra produksi pertanian, disertai pengembangan wilayah sesuai dengan keunggulan komparatif dan azas skala ekonomi. Kemampuan dan ketrampilan petani untuk memanfaatkan kesempatan ekonomi perlu pula dikembangkan. Kemudian barulah dikembangkan KUD dari bawah berdasarkan kebutuhan petani.

Pendekatan yang perlu dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi keseluruhan mata rantai agribisnis ini pada waktu mendatang adalah dengan : (1) Meningkatkan ketrampilan dan kemampuan petani dalam berusahatani secara ekonomis efisien; (2) Menyebarkan informasi pasar dan peluang pasar; (3) Menetapkan standarisasi mutu produksi pertanian secara tegas dan dapat dimengerti oleh birokrasi; (4) Mengembangkan kelembagaan berdasarkan keinginan yang dirasakan oleh birokrasi; dan (5) Konsolidasi kelembagaan pemasaran dan pengembangan market intelijen.



Penggalangan dan pengembangan sistem agribisnis yang efisien dan optimal sudah harus dimulai dalam Repelita V ini, dan ini akan memberikan landasan yang kokoh untuk dapat membantu proses tinggal landasnya sektor pertanian dan pedesaan mulai Repelita VI nanti. Dalam menghadapi pasar luar negeri sebetulnya kita sudah memiliki KADIN bersama berbagai bentuk asosiasi komoditi yang seharusnya dapat berfungsi dengan baik. Masalah utama yang kita hadapi adalah kemampuan atau daya saing komoditi harus ditingkatkan baik dalam hal harga, kualitas maupun ketepatanwaktuan dalam penyerahan barang. Masalah lainnya yang penting juga adalah kemampuan kita dalam "market intellijen" yang mencakup potensi dan prospek pasar dan prospek harga komoditi dan barang substitusinya. Disamping upaya tersebut di atas perlu pula lebih ditingkatkan kegiatan promosi komoditi pertanian kita diberbagai pasar di luar negeri. Kegiatan produksi di dalam negeri hendaknya kita kaitkan sesuai dengan prospek pasar luar negeri tersebut dan dikembangkan terbatas pada wilayah yang mempunyai keunggulan komparatif yang tinggi.

Sektor industri pengolahan yang relatif padat modal pada umumnya sangat bergantung pada sektor pertanian sebagai pemasok bahan baku. Untuk dapat mendukung jenis industri ini, komoditi pertanian yang dihasilkan haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, antara lain dari segi kuantitas misalnya, harus tersedia secara kontinyu dari segi kualitas harus konsisten sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan industri.



Industri pertanian umumnya merupakan industri yang padat karya, baik pengolahan hasil-hasil pertanian, maupun budidaya usaha pertanian. Dapat disimpulkan bahwa agroindustri yang berskala kecil lebih berperan dalam penyerapan tenaga kerja dibandingkan dengan agroindustri berskala sedang dan besar, walaupun dipihak lain memberikan kontribusi yang relatif lebih kecil terhadap nilai tambah.

Saya masih berpendapat bahwa keterkaitan antar sektor masih lemah. Oleh karena itu tekad untuk menempatkan pengembangan agroindustri dan agribisnis pada posisi sentral dalam pembangunan pertanian dan pedesaan menuntut kita untuk lebih menserasikan wilayah komoditi pertanian dengan zona industri. Pada saat ini pendekatan yang telah dilakukan Departemen Pertanian dan Departemen Perindustrian dalam pola pembinaan agroindustri dan agribisnis di pedesaan, sebagai berikut :

**(a) Pendekatan PIR (Perusahaan Inti Rakyat)**

Pola ini telah berhasil dikembangkan oleh Departemen Pertanian dan secara relatif merupakan pola yang paling paripurna untuk mengembangkan agro-industri. Skala usaha dan hubungan antara petani plasma dengan perusahaan inti telah diatur secara jelas dalam pengembangan komoditi terpilih. Langkah yang masih diperlukan adalah memperluas cakupan agro-industri dengan integrasi vertikal yang mencakup industri hilir dengan diversifikasinya. Kegiatan ini diharapkan dapat memanfaatkan semua kemungkinan yang ada pada usaha industri yang bersangkutan



dan dapat mengembangkan industri sampingan, termasuk dari bahan limbahnya. Rangsangan untuk berinvestasi, baik oleh perusahaan inti yang telah ada, maupun oleh perusahaan baru, perlu terus digalakkan. Sangat diharapkan bahwa perkoperasian akan dapat mengantarkan petani plasma menjadi pemegang saham baik dari agro-industri hilir maupun perusahaan pengolah limbah yang didirikan. Keterkaitan kelembagaan dan pembagian risiko yang seimbang antar berbagai kelembagaan yang terkait dalam PIR ini perlu lebih disempurnakan.

(b) Pendekatan Bapak Angkat

Pola yang relatif paling siap untuk dikembangkan ini dirintis oleh Departemen Perindustrian. Pola ini perlu diperluas melalui pengikutsertaan Badan Usaha Milik Negara dibawah binaan Departemen Pertanian dengan menyusun program terpadu mencakup wilayah serta komoditi terpilih. Beberapa hal yang masih perlu dikaji lebih lanjut dalam mengoperasionalkan pendekatan ini adalah : (1) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan dana BUMN yang disediakan untuk program ini; (2) Rincian peran perusahaan Bapak Angkat baik terhadap perusahaan anak angkat, koperasi maupun perusahaan swasta; (3) Tolok ukur untuk memilih Anak Angkat; (4) Tolok ukur untuk menilai keberhasilan program.



(c) Pendekatan Kelembagaan Pedesaan

Pola ini merupakan yang paling kompleks karena mencakup penggeseran seluruh tata nilai masyarakat agraris menjadi masyarakat industri, oleh karenanya, juga merupakan pola yang mempunyai dampak paling nyata terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat di pedesaan.

Pendekatan ini memerlukan langkah pematapan lebih lanjut dengan melakukan, antara lain : (1) Kajian mendalam mengenai ekonomi pedesaan khususnya yang menyangkut kendala yang membatasi perkembangan industri pedesaan diberbagai agro ekosistem. (2) Rekayasa pertanian baik mengenai kelembagaan tani maupun pola pertanaman dan pola pertanian yang menunjang timbulnya industri pengolahan; (3) Penyediaan teknologi tepat guna untuk setiap tahap produksi; dan (4) Kehadiran lembaga koperasi maupun swasta yang mau serta mampu bertindak sebagai perusahaan pembina.

Kita sudah bertekad menjadikan pembangunan pedesaan sebagai pusat perhatian pembangunan nasional, oleh karena itu dukungan Pemerintah Daerah terhadap program pengembangan agro-industri ini mutlak diperlukan.

Perkembangan ekspor komoditi pertanian Indonesia dipengaruhi oleh keadaan pasar internasional, baik dari sisi permintaan maupun dari sisi persaingan negara pemasok lainnya. Karena itu, dukungan sektor pertanian terhadap kegiatan ekspor tidak cukup dipandang dari sisi peningkatan produksi domestik saja, tetapi



juga sisi perkembangan pasar internasional perlu senantiasa turut diperhatikan. Dengan demikian, pengembangan ekspor komoditi pertanian harus dilihat tidak hanya dalam peningkatan volume dan nilainya saja, reorientasi dalam pengembangan ekspor komoditi pertanian perlu dilakukan, yaitu antara lain mencakup :

**Pertama,** ekspor komoditi pertanian harus dapat meningkatkan nilai tambah dari komoditi tersebut di pedesaan. Selama ini komposisi ekspor hasil pertanian masih lebih berat kepada ekspor bahan mentah. Dengan mengembangkan teknologi pengolahan, baik yang berskala besar maupun yang mempergunakan teknologi pengolahan yang tepat guna bagi industri kecil di pedesaan, maka akan tercipta mata rantai industri pengolahan di dalam negeri yang dapat memberikan dampak positif terhadap usaha peningkatan nilai tambah, pendapatan petani, nelayan dan pengrajin, perluasan kesempatan berusaha dan penciptaan lapangan kerja.

**Kedua,** peningkatan ekspor komoditi pertanian perlu juga dicapai melalui diversifikasi komoditi ekspor. Saat ini ekspor komoditi pertanian tertumpu pada beberapa komoditi tertentu saja. Dengan diversifikasi komoditi, maka mata dagangan ekspor komoditi pertanian diperluas, baik dengan munculnya komoditi baru yang selama ini belum dikembangkan maupun dengan menganekaragamkan jenis produk-produk ekspor dari komoditi ekspor tradisional yang biasanya diekspor dalam satu bentuk mata dagangan saja, yaitu bahan mentah.



Dengan demikian kita dapat mengatakan bahwa dalam usaha menggalang kekuatan agribisnis agar mampu mengatasi berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi di pasar internasional, sebaiknya dengan memanfaatkan wadah-wadah yang telah ada yang ditunjang oleh suatu sistem keterkaitan kerja yang saling mendukung antar berbagai sektor.

### Strategi Pengembangan Agribisnis

Implikasi yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan agribisnis adalah upaya-upaya untuk memelihara keluwesan alokasi dan penekanan investasi yang harus senantiasa didasarkan pada komposisi serta kualitas sumberdaya alam yang berbeda-beda dari suatu daerah kedaerah yang lain, dan dari suatu waktu ke waktu yang lain. Dengan demikian untuk menjamin suatu pertumbuhan perekonomian nasional yang serasi, harmonis, dan seimbang, maka diperlukan suatu perangkat kebijaksanaan perekonomian makro yang sangat memperhatikan karakteristik sektor pertanian guna dapat lebih menjamin agar sektor pertanian akan tetap dapat berperan-serta secara optimal dalam pembangunan bangsa dari masa ke masa.

Untuk mencapai tujuan yang dimaksud dan sejalan dengan karakteristik struktur perekonomian kita di masa depan, maka sementara keterlibatan pemerintah semakin berkurang, pada saat yang sama investasi pihak swasta diharapkan dapat mengisi peran pemerintah tersebut. Untuk itu dibutuhkan kondisi yang mampu



menciptakan mitra kerja yang serasi antara swasta dan petani. Dalam hal ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain : (a) Aturan main yang disepakati oleh kedua aktor ekonomi ini harus transparan; (b) Adanya kejelasan serta kepastian mengenai pembagian hasil maupun dalam menanggung resiko; dan (c) Kerjasama tersebut harus mampu mendorong kemandirian petani. Hubungan dua arah yang serasi tersebut akan lebih mendorong perkembangan agribisnis yang optimal, apabila juga dilandaskan pada pola pemikiran yang senantiasa mengacu kepada keunggulan komparatif yang berakar kuat kepada kekuatan komposisi serta kualitas sumberdaya kita sendiri, sehingga keberlanjutannya dapat terus terjamin.

Sejalan dengan itu, strategi pengembangan agro-industri yang berlandaskan pada pola pemikiran tersebut di atas diharapkan dapat menumbuhkan industri pedesaan yang mampu memacu pertumbuhan ekonomi pedesaan yang berimbang, meningkatkan nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja dengan mempersatukan tujuan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, serta pilihan lokasi industri yang efisien dan sesuai dengan tipe maupun ukuran industri yang dimaksud. Dengan demikian, untuk selanjutnya diharapkan akan muncul suatu pola dan struktur produk pertanian yang berdiversifikasi. Sumbangan nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja agro-industri tersebut dapat langsung dinikmati masyarakat pedesaan. Selain itu, sifat-sifat industri demikian pada dasarnya mempunyai dampak pengganda ("multiplier effect") yang sangat besar, yang terutama akan ditangkap dan dinikmati masyarakat maupun wilayah yang bersangkutan. Oleh karenanya,



agar agro-industri tersebut dapat berkembang secara efisien di daerah pedesaan, diperlukan reorientasi program pengembangan komoditi ke arah pengembangan sentra (seluruh) komoditas pertanian dengan dukungan sarana dan prasarana yang diperlukan.

### Penutup

Mengingat pentingnya pengembangan agribisnis ini, pemerintah bertekad menempatkan pengembangan sektor agribisnis pada posisi sentral di dalam pembangunan pertanian dan pedesaan. Tekad tersebut telah tertuang dalam GBHN '88 yang pada dasarnya masih bertumpu pada pertanian tangguh yang didukung sektor industri yang kuat.

Dalam Pelita V ini, sektor pertanian diharapkan mampu menyerap tambahan tenaga kerja yang cukup besar dalam memanfaatkan lahan yang semakin terbatas kemampuannya.

Kendala yang masih nampak dalam upaya pengembangan sektor agribisnis antara lain skala usahatani yang relatif masih kecil; kualitas dan kuantitas serta permodalan yang masih sangat terbatas perlu sedini mungkin dilonggarkan, sehingga pengembangan sektor ini dapat mencapai sasaran yang diinginkan.

Upaya-upaya untuk memelihara keluwesan alokasi investasi harus senantiasa didasarkan pada komposisi serta kualitas sumberdaya alam perlu mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan agribisnis.



Untuk mencapai tujuan tersebut, investasi dari pihak swasta diharapkan dapat terus ditingkatkan dengan cara menciptakan iklim yang lebih kondusif. Pemerintah bertekad untuk terus melanjutkan deregulasi, sembari menjamin bahwa porsi petani kecil tidak digarap oleh pengusaha besar.

Khusus dalam pengembangan agribisnis, kita perlu menyusun langkah bersama agar investasi dan alokasi dana pemerintah di pertanian dan pedesaan mampu merangsang pertumbuhan agribisnis yang kaya akan keterkaitan. Dalam upaya pemerintah memperbaiki iklim usaha sangat diharapkan masukan-masukan dari dunia swasta mengenai kendala yang masih menghadang peningkatan kesejahteraan petani kecil melalui pengembangan agribisnis akan mendorong pertumbuhan dunia swasta.

Jakarta, 29 Januari 1991

Menteri Muda Pertanian

Sjarifudin Baharsajah



**PERANAN DAN PROSPEK AGRIBISNIS  
DALAM PEMBANGUNAN DI SEKTOR PERTANIAN**

Oleh :  
**Sjarifudin Baharsjah**  
**Menteri Muda Pertanian**

**Departemen Pertanian**  
**1991**



**PERANAN DAN PROSPEK AGRIBISNIS  
DALAM PEMBANGUNAN DI SEKTOR PERTANIAN**

Oleh :  
**Sjarifudin Baharsjah**  
**Menteri Muda Pertanian**

**Departemen Pertanian**  
**1991**



**PERANAN DAN PROSPEK AGRIBISNIS  
DALAM PEMBANGUNAN DI SEKTOR PERTANIAN**

Oleh:

**Sjarifudin Baharsjah  
Menteri Muda Pertanian**

**PENDAHULUAN**

Sektor pertanian mempunyai peranan yang sangat besar dalam perekonomian nasional. Peran tersebut pada Pelita I cukup dominan, terutama dalam hal sumbangan terhadap PDB, penyerapan tenaga kerja dan devisa negara. Peran tersebut walaupun akan terus menurun sejalan dengan makin berkembangnya dan berimbangnya perekonomian nasional, namun secara absolut diharapkan akan terus meningkat. Sektor pertanian selama ini telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam hal peningkatan produksi bagi penyediaan pangan dan bahan baku industri, peningkatan ekspor serta peningkatan pendapatan petani.

Jika dilihat pembangunan jangka panjang tahap pertama, pada empat Pelita pertama (Pelita I, II, III dan IV) titik berat pembangunan ekonomi dilakukan pada sektor pertanian, sementara sektor industri berevolusi dari sektor yang mendukung pertanian sampai mencapai sektor yang lebih mapan yang dapat menghasilkan mesin-mesin sendiri. Dalam era pelita V ini, struktur ekonomi diharapkan sudah dapat mencapai tahap yang lebih berimbang, yaitu adanya kemampuan dan kekuatan industri yang maju dan didukung oleh sektor pertanian yang tangguh.



Pada tahap-tahap pembangunan yang akan datang, sektor pertanian sebagai sektor pendukung diharapkan masih akan memainkan peranan yang penting dalam pertumbuhan perekonomian Nasional. Dampak dari globalisasi ekonomi yang semakin meluas, misalnya, akan terus menuntut kita untuk mempertanggung sektor pertanian dari berbagai aspek. Untuk mencapai hal tersebut, perlu dilakukan beberapa penanganan yang sistematis, baik dibidang produksi maupun pemasarannya. Pelaksanaan diversifikasi yang terarah, pemanfaatan keunggulan komparatif dan peningkatan efisiensi merupakan alternatif kebijaksanaan yang perlu mendapatkan pengkajian secara mendalam dan terus menerus.

Dalam makalah ini, disajikan alternatif pemikiran strategis pembangunan sektor pertanian pada era tinggal landas. Disamping itu dalam makalah ini akan diungkapkan pula potensi, tantangan, dan arah yang dihadapi sektor pertanian pada masa yang akan datang. Makalah diakhiri dengan pembahasan mengenai peran dan prospek serta permasalahan agribisnis dalam era agro-industrialisasi.

## **POTENSI SEKTOR PERTANIAN DALAM ERA AGRO-INDUSTRIALISASI**

### **A. Faktor Internal**

#### **1. Kondisi Sumberdaya Alam**

Sumberdaya alam yang sangat mendukung sektor pertanian adalah lahan. Dari 191,9 juta hektar luas daratan Indonesia, seluas 133,7 juta atau 69,7 persen secara fisik mempunyai daya dukung yang memungkinkan untuk budidaya pertanian, yaitu pada lahan dengan kelas kemampuan I s/d IV. Seluas 22,4 juta hektar diantaranya diidentifikasi sebagai lahan yang cocok untuk budi



daya pertanian tanaman pangan. Sebaran dari potensi lahan tersebut mencakup 8,6 persen di Jawa, Madura dan Bali, sedangkan sisanya di luar Jawa. Tingkat penggunaan lahan ditinjau dari segi luas penggunaannya diungkapkan bahwa untuk pulau Jawa 84 persen dari lahan kelas I s/d kelas IV telah dimanfaatkan untuk budidaya pertanian, sedangkan di luar Jawa pemanfaatan lahan untuk pertanian baru mencapai 22 persen dari potensi yang tersedia. Tidak dapat dipungkiri bahwa disisi lain juga terjadi adanya penurunan kualitas daya dukung lahan-lahan pertanian, khususnya lahan kering di daerah beriklim kering dan pada lahan kering dengan kelerengan yang cukup besar masih terus berlangsung. Diperkirakan sekitar 6 juta hektar lahan di luar kawasan hutan pada saat ini dikategorikan mempunyai kondisi kritis dan semi kritis. Dalam upaya pemanfaatan sumberdaya lahan ini, disamping kita akan terus mengoptimalkan potensi yang ada, juga akan dilakukan upaya-upaya perbaikan lahan kritis. Dalam hal ini sub sektor perkebunan yang mengusahakan tanaman keras mempunyai kemampuan selain memproduksi hasil perkebunan juga berperan dalam pelestarian sumberdaya alam. Sejak pertengahan Pelita IV telah dirintis pengembangan perkebunan di daerah Kritis seperti PIR lokal kakao di Wonogiri dan PIR lokal Danau Diatas di Propinsi Sumatera Barat, PIR lokal Parsoburan di Sumatera Utara serta pengembangan kakao di Gunung Kidul.

Sumberdaya perairan umum yang sesuai saat ini adalah kurang lebih 14 juta hektar, yang terdiri atas 11,95 juta hektar sungai, rawa dan lebak lebung; 1,78 hektar danau alam dan 0,03 hektar waduk. Jenis ikan yang ada diperkirakan lebih 600 species. Pemanfaatan perairan umum dilakukan dengan cara penangkapan ikan dan budidaya. Dari perkiraan potensi lestari sebesar 590 ribu ton per tahun tingkat pemanfaatan baru sekitar 46 persen. Sedangkan potensi produksi perairan laut teritorial diperkirakan kurang lebih 4,4 juta ton per tahun dan sekitar 2 juta per tahun untuk



potensi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Tingkat pemanfaatan perairan laut teritorial baru sebesar kurang lebih 40 persen dari potensi yang ada, sedangkan pemanfaatan ZEE baru mencapai kurang lebih 24 persen dari potensinya. Walaupun diakui bahwa pada beberapa wilayah perairan pantai sudah memberikan tekanan yang tinggi terhadap sumberdaya. Di selat Malaka misalnya, tingkat penangkapan sudah melewati potensi lestari perairan yang bersangkutan. Demikian pula perairan laut Jawa dan Bali telah pula mengalami tekanan yang tinggi. Namun secara umum potensi sumber laut yang tersedia masih jauh diatas tingkat pemanfaatannya.

## 2. Kondisi Sumber Daya Manusia

Dengan proporsi penduduk yang bermata pencaharian utama sebagai petani yang cukup besar, Indonesia termasuk ke dalam kelompok negara yang pada tahap awal pembangunan perekonomian nasionalnya tertumpu pada sektor pertanian. Petani sebagai bagian terbesar penduduk pedesaan merupakan faktor penentu dan ujung tombak dalam mensukseskan pembangunan, karena merekalah yang pada akhirnya harus menetapkan keputusan dalam kegiatan usahataniannya. Namun potensi sumberdaya manusia yang besar tersebut, tidak diikuti oleh tingkat kualitas yang memadai. Data statistik menunjukkan bahwa lebih dari 70 persen tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian paling tinggi tammat Sekolah Dasar dengan tingkat keterampilan yang relatif rendah. Implikasinya adalah rata-rata tingkat upah yang mereka terima relatif rendah dibandingkan dengan tingkat upah yang diterima petani di negara tetangga. Rendahnya tingkat upah ini janganlah diartikan sebagai suatu keunggulan komparatif, namun sebaliknya kondisi yang demikian justru merupakan kelemahan kita khususnya di sektor pertanian, karena hal ini merupakan salah satu indikasi dari kemiskinan.



Dampak dari kondisi di atas, sangat dirasakan dalam perkembangan terakhir ini yang menunjukkan adanya kecenderungan keengganan angkatan muda, terutama yang berpendidikan, untuk bekerja di sektor pertanian. Hal ini mungkin disebabkan oleh citra kerja di pertanian yang dianggapnya lebih rendah karena melelahkan dan produktivitasnya rendah. Walaupun ini merupakan gejala alur transformasi struktural yang wajar di dalam proses pembangunan, namun yang menjadi tantangan bagi kita adalah bagaimana memanfaatkan potensi yang ada untuk lebih ditingkatkan produktivitasnya melalui pembinaan petani serta kelembagaannya, sehingga para petani benar-benar dapat berperan sebagai subyek pembangunan ekonomi nasional, khususnya di pedesaan yang secara terus menerus dapat meningkatkan kesejahteraannya, menjadikan mereka sebagai petani yang tangguh.

### 3. Kondisi Kelembagaan Petani

Keberhasilan pembangunan pertanian tidak terlepas dari faktor manusia dan kelembagaan yang merupakan pelaku dan wahana didalam kegiatan pembangunan pertanian. Kelembagaan tani sebagai salah satu wadah pembangunan pertanian peranannya sangat strategis baik sebagai alur penghubung antara lembaga di atasnya dengan petani maupun sebagai media didalam mempercepat proses transfer teknologi dan informasi. Salah satu permasalahan utama yang kita hadapi saat ini adalah lemahnya "bargaining position" para petani. Pemasaran hasil-hasil pertanian terutama palawija dan hortikultura, masih dihadapkan pada masalah pokok seperti skala usaha kecil, terpecahnya kegiatan produksi, tingginya biaya pengangkutan, belum memadai perkembangan industri pengolahan dan masih lemahnya informasi pasar. Kesemuanya itu menyebabkan kurang efisiennya sistem pemasaran yang ada, yang pada gilirannya menyebabkan tingginya biaya pemasaran dan



rendahnya harga yang diterima oleh petani. Peluang untuk mengatasi hambatan ini antara lain adalah dengan pengembangan kelembagaan melalui pendekatan secara sistem komoditas terpadu dalam bentuk pola PIR, perusahaan pembina, perusahaan pengelola serta bapak angkat.

Dalam menghadapi masalah skala usaha, kerjasama petani dalam kelompok sehamparan sebagai salah satu pola dasar yang telah dikembangkan, merupakan suatu potensi yang perlu terus dimanfaatkan dan dikembangkan. Dibidang pangan, khususnya beras pemekaran skala produksi lewat kerjasama kelompok tani sehamparan telah memberikan sumbangan nyata dalam pencapaian swasembada pangan. Apabila kerjasama itu dapat dikembangkan sehingga mencakup keterampilan manajerial, maka pola ini dapat diketengahkan untuk mengembangkan keterkaitan pertanian dengan industri dan perdagangan. Dalam hal kelompok tani sehamparan ini dapat diandalkan untuk bertindak sebagai pelaku pertanian berhadapan dan bekerja sama dengan koperasi dan pengusaha dalam mengembangkan agribisnis dan agro-industri.

## **B. Faktor Eksternal**

Abad ke 20 ini telah ditandai oleh berbagai pergerakan dan perubahan geopolitik yang tidak mudah diramalkan arah maupun dampaknya. Sebagai akibat struktur perekonomian yang semakin global yaitu kian menyatu, berbagai pergerakan dan perubahan tersebut secara langsung menimbulkan ketidak-pastian dan ketidak stabilan perekonomian internasional. Phenomena globalisasi berkembang selaras dengan melajunya teknologi informasi dan transportasi, sehingga semakin mengaburkan batas-batas antar bangsa. Gejala penyatuan perekonomian dunia memungkinkan ditransmisikannya dengan sangat cepat gejolak-gejolak di pasaran internasional kepada perekonomian nasional melalui arus



perdagangan, finansial maupun investasi. Sebagai akibat dari perkembangan ini semakin banyak negara, baik dari utara dan selatan, maupun negara-negara maju dan yang sedang berkembang, mencari mekanisme yang lebih pragmatis untuk memanfaatkannya globalisasi seoptimal mungkin guna memacu pembangunan ekonomi nasionalnya masing-masing.

Perkembangan situasi perekonomian dunia tersebut dapat berdampak positif maupun negatif terhadap sektor pertanian. Jika kita tidak segera tanggap terhadap setiap perubahan yang terjadi termasuk didalamnya proses globalisasi, kemungkinan besar kita tidak akan dapat menghindari secara dini dampak negatif yang diakibatkan oleh perubahan tersebut ataupun kita tidak akan mampu meraih manfaat positif dari padanya. Kemampuan kita untuk memberikan respon yang tepat pada saatnya bergantung kepada bagaimana upaya kita selama ini didalam mempersiapkan diri menyongsong perubahan-perubahan yang fundamental dimaksud.

Untuk dapat menangkap setiap peluang sebagai dampak dari perubahan-perubahan tersebut, maka kita harus sedini mungkin mempersiapkan diri untuk melakukan setiap kemungkinan yang bisa kita kembangkan, mulai dari aspek penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi sampai kepada aspek-aspek penunjang lainnya. Dalam pada itu, pendekatan dasar dalam penelitian dan pengembangan pertanian harus dilandasi oleh ketepatangunaan teknologi yang mencakup asas-asas berikut : (a) dari segi ekonomi, teknologi harus menguntungkan; (b) dari segi sosial, teknologi harus dapat diterima masyarakat; (c) dari segi lingkungan, teknologi harus tidak merusak dan harus melestarikan lingkungan; dan (d) dari aspek ketenaga kerjaan maka teknologi hendaknya meningkatkan produktivitas dan kenyamanan kerja.



Apabila memang dipandang perlu untuk diterapkan teknologi maju dalam usaha pertanian, maka teknologi tersebut harus mampu mencapai tingkat efisiensi yang tinggi, baik efisiensi teknis maupun efisiensi ekonomis. Untuk mencapai usahatani yang efisien tentunya harus diterapkan penggunaan faktor-faktor produksi yang tepat, sehingga dapat meningkatkan produktivitas usaha pertanian yang tinggi dengan biaya yang relatif murah dan tidak memberikan dampak negatif pada lingkungan.

Usaha menciptakan teknologi pertanian yang memperhitungkan aspek efisiensi penggunaan semua faktor produksi ini merupakan suatu keharusan bagi terwujudnya suatu sistem pertanian yang tangguh dan mandiri, sehingga ia akan mampu menghadapi gejolak perkembangan pasar. Untuk mencapai semua persyaratan tersebut, maka penelitian dan pengembangan perlu terus ditingkatkan, di samping upaya penyuluhan terhadap petani agar mampu menerapkan teknologi tersebut dan mengambil manfaat semaksimal mungkin. Untuk itu, ia harus ditunjang oleh suatu sistem penyuluhan yang tepat.

## **TANTANGAN YANG DIHADAPI DALAM ERA AGRO-INDUSTRIALISASI**

### **a. Kepadatan dan Penyebaran Penduduk.**

Walaupun laju pertumbuhan penduduk di Indonesia telah menurun dari 2,27 persen menjadi 1,96 persen, namun penyebarannya kurang seimbang. Jumlah penduduk sampai akhir Pelita V (1993) diperkirakan akan berkembang menjadi 192,9 juta jiwa, dan pada tahun 2000 diperkirakan akan mencapai 216,1 juta jiwa. Dari jumlah tersebut diperkirakan 58,1 % akan bermukim di Jawa, sisanya sebesar 41,9 % diperkirakan akan bermukim di luar Jawa. Komposisi penduduk dari segi jenis kelamin dalam era



tersebut relatif seimbang. Tetapi dari segi susunan tingkat usia atau angkatan kerja tidaklah demikian. Sebab jumlah yang terbanyak di antara angkatan kerja terletak pada tingkat usia 10-24 tahun. Kelompok ini mencapai sekitar 33 % dari seluruh angkatan kerja. Dari golongan ini sebagian besar bermukim di kota bukan di pedesaan, sehingga menimbulkan "urban underemployed".

Penyebaran penduduk masih tetap merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian. Data tahun 1990 menunjukkan bahwa kepadatan tertinggi masih terdapat di Jawa dengan tingkat kepadatan sebesar 826 jiwa per Km». Tingkat kepadatan ini jauh di atas tingkat kepadatan di wilayah lainnya, seperti Sumatera dengan tingkat kepadatan 80 jiwa per Km», Sulawesi 67 jiwa Km», Kalimantan 17 jiwa Km», dan wilayah lainnya sebesar 24 jiwa per Km».

#### **b. Pengelolaan Sumber Daya Alam.**

Walaupun secara riil Indonesia masih merupakan negara dengan pendapatan perkapita yang rendah di Asia tenggara, namun secara potensial Indonesia adalah negara yang paling kaya akan sumber daya alam. Masalah yang dihadapi adalah bagaimana mempertahankan kelestarian sumber daya tersebut, termasuk ke dalamnya memperluas resource base dari sumber daya alam dimaksud dan pemanfaatannya secara optimal. Dalam kaitannya dengan hal ini, pemanfaatan sumber daya alam seyogyanya didasarkan atas beberapa faktor, seperti kemampuan/kesesuaian alami dari sumber daya (tanah, iklim, dsb), kemampuan wilayah mengadaptasi teknologi secara tepat guna, dan ketersediaan sarana dan prasarana.

#### **c. Rekayasa Teknologi dan Peningkatan Effisiensi.**

Perkembangan teknologi dunia di segala bidang termasuk pertanian di dalamnya sangat pesat. Sementara itu, apabila negara



kita ingin dapat bersaing dalam bidang industri dan ekspor pertanian di pasar internasional, maka kita harus mampu menciptakan paket teknologi yang memungkinkan terciptanya "sustained comparative advantage". Paket teknologi seperti ini perlu pula dikembangkan untuk mengakomodasi permintaan domestik akan produk-produk pertanian yang terus meningkat sebagai akibat peningkatan penduduk dan daya beli masyarakat.

Sedangkan tantangan dari peningkatan efisiensi produksi erat kaitannya dengan pemanfaatan asas skala usaha. Pada saat ini proses produksi pertanian dinilai kurang efisien karena diusahakan pada luasan atau skala kecil. Beberapa upaya untuk membebaskan diri dari kendala ini yang telah dilakukan adalah melalui pendekatan PIR, pendekatan kerja sama kelompok sehamparan seperti program INSUS dan SUPRA-INSUS, maupun pendekatan Bapak Angkat. Namun hal ini masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut terutama pada tingkat aplikasinya di lapangan.

#### **d. Pembiayaan Pembangunan dan Investasi.**

Untuk mencapai tujuan strategis pembangunan nasional, yaitu perluasan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pendapatan, diperlukan pula peningkatan investasi. Secara umum, pengeluaran investasi diperoleh dari tiga sumber, yaitu : (1) tabungan pemerintah, (2) tabungan masyarakat, dan (3) dana dari luar negeri. Pembentukan permodalan yang bersumber dari masyarakat guna membiayai pembangunan sektor pertanian merupakan tantangan yang cukup berat. Secara umum dapat dikatakan, bahwa penanaman modal di bidang pertanian jauh ketinggalan dibandingkan dengan penanaman modal di sektor manufaktur dan jasa. Hal ini disebabkan investasi di sektor pertanian pada umumnya mempunyai resiko yang lebih besar bila dibandingkan dengan resiko penanaman modal di bidang industri dan jasa. Resiko tidak hanya timbul



karena gejolak harga produk pertanian, akan tetapi juga dari proses produksi yang masih tergantung pada iklim. Walaupun teknologi telah banyak membantu mengurangi resiko itu, khususnya dalam perlindungan terhadap hama dan penyakit, tetapi iklim tetap merupakan faktor ekstrim yang tak terkendali. Tempo dan irama alamiah tidak dapat diubah terlalu banyak, sehingga jangka waktu tanaman belum menghasilkan (TBM) dan sifat musiman selalu harus diperhitungkan oleh penanam modal.

Aspek lain yang tampaknya ikut memperlambat laju penanaman modal di sektor pertanian adalah keharusan untuk sejak awal menerapkan pendekatan terpadu yang utuh. Kebanyakan produk, pertama cepat membusuk dan bervolume besar dibandingkan nilainya. Penanganan pasca panen, penyimpanan, pengolahan, pengangkutan, dan lancarnya pemasaran menjadi sangat penting. Apabila penanaman modal tidak mampu menerapkan prinsip integrasi vertikal dalam investasinya, ia harus tergantung kepada adanya investasi lain yang menjamin hadirnya semua mata rantai yang diperlukan agar produknya dapat dipasarkan dengan baik. Sejalan dengan sasaran pemerintah bahwa pada era agro-industrialisasi nanti, sumber dana investasi berasal dari sektor swasta, maka pihak swasta diharapkan lebih berperan aktif dalam menanamkan modalnya di sektor pertanian.

#### **e. Pemerataan dan Kesenjangan Sosial.**

Secara umum, pembangunan yang selama ini dilaksanakan telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Namun demikian, hal ini bukan berarti bahwa berbagai kesenjangan telah dapat diatasi. Beberapa hal yang terkait dengan kesenjangan berikut kemungkinan penyebabnya dapat kita ungkapkan.



Seperti telah diketahui bersama, gambaran saat ini menunjukkan bahwa sekitar 80 persen dari penduduk Indonesia berada di pedesaan, lebih dari 54 persen di antaranya bekerja di sektor pertanian dengan rata-rata tingkat pendapatan relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang berada di perkotaan. Berdasarkan harga yang berlaku pada tahun 1988, PDB rata-rata per tenaga kerja di sektor pertanian baru mencapai Rp. 860.000,00, sedangkan di sektor industri telah mencapai Rp. 4.300.000,00 atau perbandingannya sekitar 1 : 5.

Sebab-sebab utama dari masih rendahnya pendapatan penduduk pedesaan, terutama yang bekerja di sektor pertanian adalah pola produksi yang masih terkekang oleh skala usaha sangat sempit, kurangnya investasi, dan prasarana fisik dan non fisik yang masih belum memadai.

Selain aspek-aspek tersebut, faktor lain yang juga memberikan andil dalam memperlebar kesenjangan baik antar wilayah maupun di antara masyarakat pedesaan, yaitu : Pertama, apa yang kita sebut dengan kegagalan pasar. Dari pengalaman selama ini, dapat ditunjukkan bahwa perkembangan ekonomi yang mengandalkan pada kekuatan pasar, ternyata proporsi terbesar dari manfaat yang ditimbulkannya justru dinikmati oleh masyarakat ekonomi menengah ke atas. Masyarakat ekonomi lemah, termasuk didalamnya petani kecil, dalam sistem ini hampir tidak terjangkau sama sekali. Hal ini disebabkan ketidakmampuan mereka dalam menangkap sinyal-sinyal pasar yang ada. Apabila hal ini terus berlanjut, tentunya akan makin memperlebar kesenjangan di antara masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan. Kedua, kebijaksanaan yang cenderung bersifat uniform. Seperti kita ketahui, bahwa negara kita merupakan negara kepulauan yang mempunyai keragaman yang tinggi dalam berbagai hal termasuk di dalamnya sumberdaya. Penyamataan kebijaksanaan pembangunan, baik regional maupun



sektoral, tanpa memperhatikan keragaman di atas, akan menghasilkan respon yang berbeda antara pelaku ekonomi yang kuat dan yang lemah, ataupun daerah yang kaya sumberdaya alam dan prasarana dengan daerah yang miskin. Apabila kebijaksanaan uniform ini terus dipertahankan, dikhawatirkan dapat memperlebar kesenjangan antara desa dengan kota, atau antara wilayah yang kaya sumberdaya alam dan fasilitas dengan wilayah yang miskin sumberdaya alam dan kurang fasilitas atau daerah terbelakang.

## **ARAH PEMBANGUNAN PERTANIAN DALAM ERA AGRO-INDUSTRIALISASI**

### **a. Penyediaan Pangan.**

Mempertahankan swasembada beras berarti mengupayakan peningkatan produksi beras pada tingkat tertentu setiap tahun secara berkesinambungan, yaitu minimal sama dengan pertumbuhan konsumsi yang diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk dan pendapatan. Dalam Pelita V jumlah penduduk diperkirakan tumbuh dengan 1,9 persen/tahun. Ditambah dengan peningkatan pendapatan per kapita yang menyebabkan peningkatan konsumsi beras perkapita, maka pada Pelita V diharapkan produksi padi meningkat sebesar 3,2 persen/tahun. Harus diakui bahwa mempertahankan swasembada beras ini makin lama makin sulit. Dua variabel yang mempengaruhi produksi yaitu luas panen dan produktivitas (hasil/ha) sudah semakin sulit untuk dipacu peningkatannya.

Selain penyediaan pangan karbohidrat, pengadaan pangan protein merupakan tantangan yang harus dihadapi dalam rangka penyediaan pangan dengan kandungan nutrisi yang lebih seimbang. Pada Pelita IV konsumsi per kapita pangan protein hewani tumbuh lebih cepat dibandingkan konsumsi karbohidrat. Program penyediaan pangan nasional, memperkirakan bahwa konsumsi per



kapita daging, telur, susu dan ikan tumbuh dengan laju masing-masing 8,4 persen, 8,7 persen, 3,2 persen, dan 5,5 persen/tahun.

**b. Dukungan Kepada Sektor Industri.**

Sebagian dari sektor industri yang relatif padat modal bergantung pada sektor pertanian sebagai pemasok bahan baku. Karena itu, produksi beberapa komoditi pertanian, misalnya komoditi perkebunan, dituntut untuk meningkat dengan pertumbuhan yang cepat. Untuk dapat mendukung jenis industri ini, komoditi pertanian yang dihasilkan haruslah memenuhi syarat antara lain, dari segi kuantitas tersedia secara kontinu dan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan dan dari segi kualitas tersedia secara konsisten sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan industri. Agar sektor pertanian secara berkesinambungan dapat menyumbang secara optimal kepada peningkatan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan petani, upaya diversifikasi untuk mencari sumber pertumbuhan baru dan pengembangan agro-industri untuk meraih nilai tambah yang lebih besar dapat menjadi pilihan strategis guna mencapai sasaran pertumbuhan perekonomian secara merata.

Seperti diketahui, bahwa pengembangan diversifikasi vertikal bertujuan untuk memperkenalkan tambahan kegiatan atau perlakuan terhadap komoditas setelah dipanen. Dengan demikian para petani/pedesaan yang bersangkutan dapat memperoleh nilai tambah dari komoditas yang dihasilkan. Melalui kegiatan ini (penyimpanan, pengeringan, pengolahan, pengangkutan dan seterusnya), maka nilai tambah yang semula dinikmati oleh pihak lain (prosesor, pedagang) berangsur-angsur akan beralih kepada petani produsen yang bersangkutan, sehingga dengan demikian pendapatan petani dapat ditingkatkan.



Lebih lanjut, agar pengembangan agro-industri tersebut dapat meraih manfaat yang optimal, maka dalam pengembangannya perlu didasarkan atas keunggulan komparatif yang dimiliki, karena ini akan menjamin pasar untuk produk yang dihasilkan. Untuk itu perlu diteliti secara seksama dimana letak keunggulan komparatif tersebut dalam bentuk apa. Keunggulan tersebut perlu pula dikaji dari waktu ke waktu karena keunggulan ini berubah dengan adanya perubahan teknologi, struktur ekonomi, struktur pasar internasional dan sebagainya.

Selain pengembangan industri padat modal atau yang menggunakan teknologi canggih tersebut di atas, pilihan strategi lainnya untuk pencapaian pertumbuhan perekonomian Indonesia yang diinginkan adalah pengembangan agro industri di pedesaan. Pengembangan agro industri ini selain diarahkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi, juga sekaligus diarahkan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan petani.

Untuk dapat memberikan dukungan yang penuh terhadap perkembangan agro-industri di pedesaan, kendala-kendala yang masih melekat pada sektor pertanian harus segera dapat diatasi. Kendala tersebut antara lain adalah masih tersebarunya usahatani skala kecil sehingga menyulitkan penanganan pasca panen, masih beragamnya kualitas bahan baku yang dihasilkan, dan jumlah produksi acap kali berfluktuasi secara tajam sehingga kontinuitas proses produksi di sektor industri terganggu. Selain itu pembentukan modal dalam masyarakat pedesaan untuk membiayai pengembangan agro industri masih terbatas.

Dengan demikian, agro industri yang dikembangkan di pedesaan perlu berpijak di atas: (1) prinsip keunggulan komparatif; (2) tingkat keterampilan masyarakat dalam memantapkan jenis industri pengolahan yang telah dikenal lingkungannya; (3) tersedianya



bahan baku yang berkesinambungan; (4) tersedianya fasilitas kredit dengan bunga ringan bagi masyarakat pedesaan; dan (5) tersediannya prasarana dan fasilitas pelayanan di pedesaan.

### c. Dukungan Pada Peningkatan Ekspor.

Setelah mengalami masa-masa sulit sebagai akibat kurangnya penerimaan dari ekspor minyak bumi secara drastis, maka upaya peningkatan ekspor non migas menjadi salah satu kebijaksanaan pemerintah dalam memantapkan ketangguhan perekonomian nasional. Ekspor pertanian sebagian besar berasal dari subsektor perkebunan dan perikanan, diantaranya komoditi karet, kopi, teh, sawit, udang, tuna dan cakalang. Beberapa komoditi dari subsektor pangan dan peternakan juga turut diekspor, seperti gaplek, jagung, dan kulit ternak; namun masih dalam volume dan nilai yang relatif rendah.

Perkembangan ekspor komoditi pertanian Indonesia dipengaruhi oleh keadaan pasar internasional, baik dari sisi permintaan maupun dari sisi persaingan negara pemasok lainnya. Karena itu, dukungan sektor pertanian terhadap kegiatan ekspor tidak cukup dipandang dilihat dari sisi peningkatan produksi domestik saja tetapi sisi perkembangan pasar internasional perlu senantiasa turut diperhatikan. Pengembangan ekspor komoditi pertanian harus dilihat tidak hanya dalam peningkatan volume dan nilainya saja. Reorientasi dalam pengembangan ekspor komoditi pertanianpun perlu dilakukan, yang dapat mencakup berbagai aspek.

Pertama, ekspor komoditi pertanian harus dapat meningkatkan nilai tambah dari komoditi tersebut. Selama ini komposisi ekspor hasil pertanian masih lebih berat kepada ekspor bahan mentah. Dengan mengembangkan teknologi pengolahan, baik yang berskala besar maupun yang mempergunakan teknologi pengolahan yang tepat



guna bagi industri kecil di pedesaan, maka akan tercipta mata rantai industri pengolahan di dalam negeri yang dapat memberikan dampak positif terhadap usaha peningkatan nilai tambah, pendapatan petani, nelayan dan pengrajin, perluasan kesempatan berusaha dan penciptaan lapangan kerja. Dengan demikian, ekspor komoditi pertanian diarahkan pada barang setengah jadi dan barang jadi.

Kedua, peningkatan ekspor komoditi pertanian perlu juga dicapai melalui diversifikasi komoditi ekspor. Saat ini ekspor komoditi pertanian tertumpu pada beberapa komoditi tertentu saja. Dengan diversifikasi komoditi, mata dagangan ekspor komoditi pertanian diperluas, baik dengan munculnya komoditi baru yang selama ini belum dikembangkan maupun dengan menganekaragamkan jenis produk-produk ekspor dalam satu bentuk mata dagangan saja, yaitu bahan mentah.

Ketiga, peningkatan ekspor komoditi pertanian perlu disertai dengan pengembangan diversifikasi pasar ekspor. Sampai saat ini hampir semua ekspor komoditi pertanian andalan ditujukan pada satu atau dua pasar saja. Misalnya, karet ke Amerika Serikat, minyak sawit ke MEE, dan udang ke Jepang. Ketergantungan seperti ini tidak sehat bagi perekonomian nasional dalam jangka panjang. Apabila terjadi perubahan perilaku pasar di negara-negara yang mendominasi pembelian komoditi ekspor kita, baik perubahan yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan, perubahan tersebut akan sangat mempengaruhi stabilitas kegiatan ekspor dan kegiatan ekonomi komoditi yang bersangkutan di dalam negeri. Karena itu pengembangan ekspor komoditi pertanian perlu disertai dengan usaha penerobosan pada pasar-pasar non tradisional, seperti pasar-pasar di negara berkembang.



Kegiatan reorientasi ekspor tersebut perlu dilandasi oleh kajian keunggulan komparatif komoditi, dan telaahan peluang pasar internasional, sehingga pengembangan komoditi ekspor tersebut dapat berwawasan jangka panjang dan lestari. Disamping itu, pengembangan ekspor komoditi pertanian merupakan kegiatan ekspor dengan keterkaitan ke belakang yang dapat menghela kegiatan pertanian, sehingga aktif dalam meningkatkan kegiatan perekonomian di pedesaan, menambah pendapatan petani, memperluas penciptaan kesempatan kerja, dan menaikkan nilai tambah.

**d. Dukungan Bagi Pemerataan Pembangunan dan Pendapatan.**

Tanpa mengesalkan hasil-hasil yang telah dicapai selama ini, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya masih perlu mendapat perhatian khusus dalam era agro-industrialisasi nanti. Pemerataan ini mencakup dua hal, yakni pemerataan antar wilayah dan pemerataan pendapatan secara keseluruhan. Dalam hal pertama, harus diakui bahwa pembangunan dari segi perwilayahan selama ini lebih dititikberatkan pada wilayah Indonesia Bagian Barat (IBB). Oleh karena itu wilayah Indonesia Bagian Timur (IBT) masih cukup jauh ketinggalan dalam banyak hal dibandingkan dengan IBB. Prasarana dasar seperti sarana jalan, fasilitas transportasi, dan fasilitas perhubungan lainnya di IBT masih jauh tertinggal dibandingkan dengan keadaan fasilitas di IBB. Di lain pihak, potensi sumberdaya IBT cukup besar, misalnya wilayah darat IBT merupakan 40 persen dari seluruh wilayah darat Indonesia, sedangkan wilayah laut IBT lebih dari 50 persen seluruh wilayah laut Indonesia, sedangkan sumbangan IBT pada total produk domestik bruto (PDB) hanya 4 persen dari total PDB Indonesia. Pembangunan wilayah IBT perlu mendapat perhatian, demikian pula halnya dalam hal pembangunan pertanian. Karena potensi perikanan yang sangat besar di wilayah ini, pengembangan komoditas perikanan perlu mendapat perhatian khusus.



Pemerataan pendapatan cenderung membaik selama ini, namun demikian belum seperti yang diharapkan. Pangsa yang diterima mereka yang bergerak di bidang pertanian atau dengan kata lain mereka berada di pedesaan masih belum seimbang dengan mereka yang berada di sektor lain. Keseimbangan pangsa yang diterima oleh setiap sektor perlu mendapat perhatian khusus pula dalam era agro-industrialisasi. Dalam hal ini peranan pemerintah yang cukup besar tetap diperlukan karena mekanisme pasar sendiri tidak akan mampu untuk mengatasi hal tersebut.

**e. Pembinaan Usaha Tani dan Kelembagaan.**

Apabila kita amati secara seksama pada prinsipnya disamping petani dan kelompok tani, pelaku lainnya dalam pembangunan sektor pertanian dapat diklasifikasikan sebagai: (1) Koperasi Unit Desa; (b) BUMN; dan (c) Perusahaan Swasta. Koperasi sebagai soko guru ekonomi diharapkan mampu berperan aktif didalam memperkuat perekonomian pada skala kecil dan usaha keluarga di desa, dengan antara lain secara aktif membantu petani menyalurkan baik input maupun hasil produk serta juga didalam memberikan bimbingan teknis. Sedangkan swasta, sebagai pelaku ekonomi lainnya perlu diberi tempat dan kesempatan pengembangannya di sektor pertanian dalam upaya merangsang dan memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagai dinamisator dan stabilisator pembangunan, pemerintah perlu tetap mempertahankan dan menumbuh suburkan BUMN sebagai badan usaha yang tidak hanya berfungsi sebagai agent development, penyerapan tenaga kerja, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Tugas utama kita adalah bagaimana menyelaraskan pelaku-pelaku tersebut sehingga sasaran pembangunan yang dirumuskan dalam Trilogi pembangunan dapat dicapai tanpa ada yang dikorbankan antara satu dengan yang lainnya.



#### **f. Dukungan Dalam Melestarikan Lingkungan.**

Masalah kelestarian lingkungan belakangan ini sudah mulai menjadi masalah sejalan dengan perkembangan sektor industri. Walaupun keluhan terhadap pencemaran lingkungan selama ini terutama ditujukan kepada industri-industri pengolahan, tidak mustahil pada waktu yang akan datang akan terjadi hal yang sama pada sektor pertanian apabila tidak diambil tindakan pencegahan sejak sekarang. Di negara-negara maju umpamanya, penggunaan bahan-bahan kimia dosis tinggi untuk pemupukan secara berkepanjangan tanpa usaha-usaha penangkaran khusus telah menyebabkan pencemaran lingkungan. Selain itu, penggunaan sumber daya alam secara berlebihan ("over exploitation") perlu diwaspadai. Oleh karena itu pemanfaatan sumber daya alam perlu disertai dengan usaha-usaha untuk melestarikannya.

#### **PERAN DAN PROSPEK AGRIBISNIS DALAM ERA AGRO-INDUSTRIALISASI**

Setidak-tidaknya ada beberapa alasan keperluan untuk meletakkan harapan kita pada kegiatan agribisnis dalam pembangunan ekonomi nasional guna menyongsong era agro-industrialisasi ini.

Pertama, kita harus senantiasa mencari sumber pertumbuhan kegiatan ekonomi yang mampu memanfaatkan keterkaitan pertumbuhan antar sektor. Seperti yang telah dikemukakan, kegiatan agribisnis dalam perekonomian kita, merupakan perekat bidang singgung antara sektor pertanian dengan sektor-sektor lainnya. Pada tingkat perekonomian kita saat ini, pertumbuhan sektor pertanian tidak akan bisa dipercepat tanpa mengindahkan keterkaitan yang erat antara kegiatan produksi, pengolahan manufaktur, dan pemasaran. Salah satu sebab kenapa alokasi



penggunaan sumberdaya kita dalam meningkatkan nilai-tambah ekspor komoditas pertanian tradisional masih sub-optimal adalah karena keterbatasan kita dalam meraih kesempatan dan peluang pasar yang ada. Keterbatasan tersebut tidak akan pernah dapat kita dobrak apabila kegiatan di sektor pertanian hanya berorientasi kepada kegiatan produksi saja.

Kedua, secara nasional kita mempunyai keperluan yang mendesak untuk menyiapkan lapangan kerja baru dalam menghadapi tambahan jumlah angkatan-kerja yang terus meningkat setiap tahun. Kegiatan agribisnis merupakan kegiatan multi-faset karena keberadaannya pada berbagai tingkat memungkinkannya untuk dikembangkan sampai ke daerah pedesaan. Oleh karena itu, melalui rekayasa pengembangan yang tepat, kegiatan agribisnis berpotensi tinggi untuk menampung dan bahkan menciptakan lapangan kerja baru. Dalam hubungan ini kita menghadapi paling tidak dua tantangan. Kualitas surplus tenaga kerja yang meninggalkan sektor pertanian karena tertarik kepada aktivitas ekonomi yang memberikan arus pendapatan lebih baik harus dapat ditingkatkan. Pada saat yang sama, kualitas tenaga kerja yang memilih menetap di sektor pertanianpun harus ditingkatkan pula apabila produktivitasnya diharapkan mampu berkompetisi dengan produktivitas tenaga kerja di sektor lain.

Ketiga, secara nasional kita juga mempunyai kepentingan untuk menciptakan landasan yang kokoh bagi perluasan ekspor non-migas yang berakar kepada keunggulan komparatif yang kita miliki. Dalam pada itu, penerobosan terhadap pasar dunia selama ini sangat terbatas karena sebagian besar hasil-hasil pertanian kita masih diekspor dalam bentuk barang-barang mentah ataupun setengah jadi. Sedangkan spektrum potensi permintaan pasar yang dapat kita raih sangat lebar apabila hasil-hasil pertanian tersebut diekspor dalam bentuk hasil-hasil manufaktur. Pemikiran untuk



mengembangkan kegiatan agribisnis antara lain didasarkan kepada potensinya dalam meningkatkan nilai tambah produksi hasil-hasil pertanian kita, bukan saja terbatas pada tingkat petani, tetapi juga sampai ketingkat perdagangan internasional.

Keempat, bagi kami di sektor pertanian adalah juga sangat penting karena pangsa produsen bahan mentah, terutama sekali bagi petani dan pekebun, dalam meraih pendapatan dari proses nilai tambah perlu diperbesar. Keperluan ini erat kaitannya dengan upaya kita untuk senantiasa memoderenisasikan sektor pertanian agar dapat selalu berkompetisi dan mengimbangi perkembangan yang terjadi di sektor lain.

Kelima, kegiatan agribisnis sangat mengandalkan keberadaan sumberdaya alam pertanian yang mempunyai karakteristik dasar sebagai sumberdaya yang senantiasa dapat diperbarui (renewable resources). Karakteristik ini merupakan modalitas yang penting ditonjolkan karena dengan demikian keberlanjutan aktivitas ekonominya senantiasa dapat dipertahankan, tanpa mengurangi keberadaan dan mutu sumberdaya alam pertanian kita.

Kelima alasan yang dikemukakan tersebut memberikan gambaran kepada kita kenapa peran kegiatan agribisnis mempunyai prospek yang sangat penting dalam menyumbangkan andilnya bagi pembangunan ekonomi nasional kita. Akan tetapi masalah yang kiranya paling mendasar yang perlu mendapatkan perhatian kita adalah kenapa kegiatan agribisnis tersebut belum berkembang sebagaimana mestinya, dan faktor-faktor apakah yang menjadi kendala dalam pengembangan agribisnis di Indonesia.



## KENDALA DALAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS

Meskipun cukup banyak kendala yang membatasi perkembangan agribisnis di Indonesia, namun hanya beberapa faktor pembatas saja yang dibahas disini dan dianggap paling dominan.

Seperti yang telah dikemukakan, kegiatan agribisnis dalam perekonomian kita merupakan perekat bidang singgung antara sektor pertanian dengan sektor-sektor yang lain. Oleh karena itu keterkaitan yang erat antar sektor merupakan prasyarat utama bagi berkembangnya kegiatan agribisnis. Pentingnya unsur keterkaitan antar sektor ini sering kali luput dari perhatian kita. Pengembangan industri makanan jadi yang bertujuan untuk substitusi impor, misalnya, sedapat mungkin harus memanfaatkan sumberdaya pertanian kita. Kelayakan arti ekonominya tidak cukup hanya dengan mengandalkan kepada potensi permintaan pasar saja. Kegiatan agro-industri yang tidak berakar kepada sumberdaya alam pertanian kita justeru akan menjadi bumerang karena pada akhirnya hanya akan menyebabkan meningkatnya ketergantungan kita kepada bahan baku impor. Sebaliknya, alokasi pemanfaatan sumberdaya pertanianpun tidak akan pernah optimal apabila mengabaikan potensi permintaan pasar.

Kegiatan agribisnis sangat memerlukan dukungan teknologi pertanian dan teknologi industri yang lebih maju. Dalam hal ini, bioteknologi dan bioproses merupakan jalur cepat yang dapat kita tempuh guna memacu pertumbuhan sektor pertanian masa depan. Upaya untuk meningkatkan kemampuan kita dalam penelitian dan pengembangan di bidang bioteknologi ini harus kita pacu apabila kegiatan agribisnis ingin kita tumbuh-kembangkan. Dalam pada itu, kita berkeyakinan bahwa meskipun dalam bentuk rekayasa teknologi yang masih primitif, sebagian konsepsi dan bentuk bioteknologi dan bioproses tersebut sebenarnya telah dikenal oleh



masayarakat kita di pedesaan. Modalitas inipun harus dapat kita kembangkan karena akan lebih memudahkan apabila hasil rekayasa teknologi itu akan disebarluaskan penggunaannya.

Kegiatan agribisnis, menuntut prasyarat sekala ekonomi tertentu. Ketersediaan bahan baku secara berkelanjutan, persyaratan kualitas, serta perlakuan lainnya menyebabkan dimensi sekala ekonomi yang dimaksud mungkin berbeda sama sekali dengan konsep sekala ekonomi dalam kegiatan produksi pertanian yang selama ini telah kita kenal. Sebagai sumber pemasok bagi kegiatan pengolahan selanjutnya, kegiatan tersebut memerlukan suatu rangkaian pengendalian mutu yang ketat karena dapat mempengaruhi efisiensi teknis dan ekonomis bagi keseluruhan kegiatan agribisnis.

Kegiatan agribisnis memerlukan bentuk dan unit organisasi ekonomi perusahaan yang spesifik serta kompatibel dengan jenis komoditas yang diusahakan. Salah satu sebab kenapa kegiatan agribisnis di Indonesia belum dapat memberikan performansi yang optimal adalah karena pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan kepada suatu unit organisasi perusahaan yang secara teknis manajerial lebih banyak berorientasi kepada aspek produksi bahan baku saja. Organisasi perusahaan yang diperlukan harus mempunyai kemampuan menopang bukan saja kegiatan produksi dan pengolahan, tetapi juga berkemampuan dalam menunjang upaya penetrasi dalam memanfaatkan peluang pasar. Upaya penetrasi pasar bagi produk-produk industri hilir, misalnya, memerlukan unit organisasi perusahaan yang ditopang dengan keahlian dalam negosiasi dengan mitra dagang ataupun mitra usaha yang umumnya telah memiliki reputasi internasional dan mempunyai pangsa pasar dunia yang telah mapan.



Iklim usaha mungkin masih belum kondusif bagi menunjang kegiatan agribisnis yang sehat. Kebijakan deregulasi baik dalam bidang moneter, maupun dalam bidang fiskal dan perdagangan yang telah ditempuh oleh pemerintah secara konsekuen dalam beberapa tahun terakhir ini merupakan langkah-langkah yang sangat penting artinya bagi menciptakan iklim berusaha yang lebih sehat untuk berkembangnya kegiatan agribisnis di Indonesia.

Kendala pasar yang seringkali membatasi upaya kita untuk menerobos pasar internasional adalah eskalasi tarif yang dikenakan oleh banyak negara atas produk olahan yang kita ekspor. Kita mengatasi hal itu, dengan turut berpartisipasi aktif lewat perundingan GATT dalam memperjuangkan turunnya tarif tersebut. Disamping itu, kitapun melakukan perundingan bilateral agar dapat memanfaatkan pasar-pasar yang dapat menyerap produk olahan kita.

Kendala yang dianggap paling penting dan kiranya paling relevan serta menyangkut langsung dengan masalah lembaga pendidikan manajemen adalah keterbatasan kualitas sumber daya manusia yang dapat menunjang kegiatan agribisnis secara profesional. Ketrampilan teknis yang diperlukan dalam menerapkan teknologi pertanian dan teknologi industri yang telah maju masih sangat terbatas. Disamping itu, jumlah sumberdaya manusia yang mempunyai kemampuan manjerial yang kompatibel dengan kebutuhan kegiatan agribisnis pun masih langka. Kebutuhan sumberdaya manusia dengan kualitas yang diperlukan tersebut kini sangat terasa. Salah satu bukti empiris yang mendukung kenyataan itu adalah dengan semakin berkembangnya lembaga-lembaga pendidikan yang berupaya memberikan pelayanan bagi penyiapan tenaga-tenaga manajer profesional pada berbagai tingkat keahlian yang dibutuhkan. Kepeloporan Perguruan Tinggi yang bercitera "Center of Excellence" sangat diperlukan agar perimbangan antara



pelayanan dengan keperluan tenaga manajer profesional tersebut dapat terjadi sesuai dengan jumlah dan mutu kualitas yang diharapkan.

## **PENUTUP**

Pembahasan dalam makalah ini dimulai dengan memberikan gambaran mengenai pembangunan pertanian dalam perekonomian nasional kita yang berada dalam phase transisi. Perubahan struktur perekonomian yang telah kita alami sebagai konsekuensi dari keberhasilan pembangunan menuntut keperluan untuk mendapatkan sumber-sumber pertumbuhan baru di sektor pertanian. Dalam kaitan ini kita berkesimpulan bahwa kinilah saatnya menggalakkan kegiatan agribisnis di Indonesia.

Telah diuraikan, meskipun secara terbatas, hal-hal yang menyebabkan kenapa kegiatan agribisnis tersebut penting artinya bagi Indonesia, dan mempunyai prospek yang cerah bagi perkembangan perekonomian nasional kita, khususnya bagi pembangunan di sektor pertanian. Makalah ini juga mengupas beberapa faktor dominan yang menjadi kendala dalam perkembangan kegiatan agribisnis di Indonesia.

Salah satu faktor yang menjadi kendala dalam perkembangan agribisnis adalah keterbatasan kita dalam menyediakan kualitas sumberdaya manusia yang diperlukan agar dapat menunjang kegiatan agribisnis tersebut. Dalam hubungan ini kita menggarisbawahi arti penting dan peran lembaga Perguruan Tinggi dalam menyiapkan tenaga-tenaga manajer profesional yang diperlukan.



**PENINGKATAN PERANAN SWASTA  
DALAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS DI INDONESIA**

Oleh :  
Sjarifudin Baharsjah

Departemen Pertanian  
1991





MENTERI MUDA PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA

**PENINGKATAN PERANAN SWASTA  
DALAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS  
DI INDONESIA**

**Pidato Pengarahan pada Workshop  
Pengembangan Agribisnis Hortikultura  
dan Rempah-Rempah di Indonesia  
Berastagi, 28 Mei 1991.**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Saudara-saudara hadirin, peserta workshop yang saya hormati,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, nikmat dan Karunia-Nya yang sungguh besar pada hari ini kita dapat berkumpul di Berastagi, di tempat yang baik ini untuk membicarakan tekad kita dalam memacu perkembangan agribisnis dan agro-industri dalam pembangunan pertanian di Indonesia.

Tema workshop "PENINGKATAN PERANAN SWASTA DALAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS HORTIKULTURA DAN REMPAH-REMPAH DI INDONESIA" merupakan fokus yang tepat, karena pada saat ini peranan swasta sangat diharapkan untuk memacu pengembangan Agribisnis dan Agro-industri.



Pembangunan ekonomi nasional yang sedang kita laksanakan sampai saat ini telah memasuki tahap-tahap akhir dari Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun pertama (Bangkajang-I). Banyak kemajuan yang telah kita capai termasuk pembangunan di sektor pertanian. Sebagai negara yang kaya dengan sumberdaya alam hayati, maka peran sentral sektor pertanian dalam pembangunan nasional senantiasa mendapatkan perhatian yang besar dari pemerintah. Pembangunan pertanian di Indonesia memang mempunyai dimensi yang strategis karena keberadaan sumberdaya hayati yang dimiliki sebagian besar masyarakat kita, terutama yang tinggal di daerah pedesaan masih bekerja dan mendapatkan nafkah dari sektor ini. Dengan demikian, sektor pertanian masih merupakan basis kegiatan ekonomi yang menyediakan dan menyerap tenaga kerja dan menjadi salah satu sektor andalan bagi upaya meratakan pembangunan nasional.

Sesuai dengan amanat GBHN bahwa prioritas pembangunan diletakkan pada bidang ekonomi dengan titik berat pada sektor pertanian dan industri untuk mewujudkan struktur ekonomi yang berimbang, meningkatkan nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja, maka pendekatan agribisnis merupakan strategi yang tepat untuk mengembangkan sektor pertanian.

Jika kita lihat secara seksama, pengembangan agribisnis dapat mencakup tiga aspek : (1) Aspek pengelolaan usaha pertanian yang meliputi perkebunan, pangan termasuk hortikultura, perikanan dan peternakan; (2) Aspek produksi penunjang kegiatan pra dan pasca panen seperti industri penghasil pupuk dan alat mekanisasi pertanian, pestisida, bibit unggul, serta (3) Aspek sarana jasa penunjang seperti perbankan, sarana tata niaga dan penyuluhan petani khususnya yang menyangkut kegiatan agribisnis. Dari ketiga aspek tersebut, agribisnis ternyata mempunyai lingkup yang luas karena tidak hanya mencakup bidang-bidang produksi saja, melainkan juga pasca produksi dan termasuk pula berbagai industri sarana serta penunjangnya.



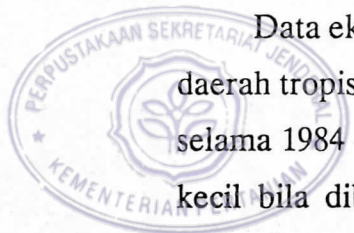
**Saudara-saudara yang saya hormati,**

Hortikultura dan rempah-rempah mempunyai peranan yang semakin penting karena permintaan yang semakin meningkat di dalam maupun di luar negeri. Peningkatan permintaan tersebut sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan penduduk, peningkatan pendapatan perkapita, urbanisasi, serta pendidikan yang mempengaruhi kesadaran gizi. Berkembangnya industri pengolahan bahan makanan juga turut memacu laju permintaan komoditas tersebut. Pertumbuhan pasar swalayan yang relatif cepat di kota-kota besar akan menambah dan merubah pola permintaan masyarakat akan komoditas hortikultura. Perkembangan industri pariwisata, pembangunan hotel dan rumah makan memberikan pula dampak positif terhadap pasar hortikultura di dalam negeri. Statistik menunjukkan bahwa selama periode 1984 -1988 konsumsi sayuran per kapita per tahun meningkat dari 17,07 menjadi 25,3 kg sedangkan konsumsi buah-buahan meningkat dari 25,8 menjadi 34,43 kg.

Demikian pula, permintaan akan rempah - rempah dan minyak atsiri terus bertambah sejalan dengan berkembangnya industri-industri rokok kretek, kosmetika, obat-obatan dan makanan jadi. Komoditas rempah-rempah dan minyak atsiri yang banyak digunakan dalam industri tersebut antara lain cengkeh, lada, kayu manis, pala, panili, jahe, serai wangi, akar wangi, nilam dan sebagainya.

Dari segi sumberdaya lahan dan agroklimat, Indonesia mempunyai potensi yang cukup besar untuk pengembangan berbagai jenis komoditas, termasuk produk hortikultura dari daerah sub-tropis. Lahan yang potensial untuk pengembangan komoditas khususnya di luar Jawa masih cukup luas, termasuk diantaranya lahan pekarangan, tegalan, ladang/huma, juga pada lahan pangan pada proyek-proyek PIR yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Data ekspor menunjukkan bahwa permintaan terhadap komoditas hortikultura daerah tropis di pasar internasional terus meningkat dengan laju 19 persen pertahun selama 1984 - 1988. Namun demikian pangsa ekspor Indonesia relatif masih sangat kecil bila dibandingkan dengan negara tetangga seperti Thailand, Philipina dan

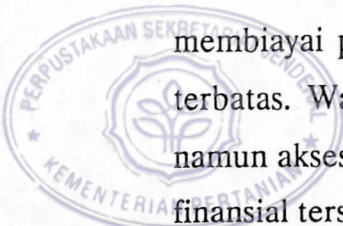


Malaysia, terutama untuk pasar-pasar Hongkong, Singapura, Jepang dan Korea Selatan.

Pangsa ekspor rempah-rempah Indonesia menduduki tempat yang cukup penting terutama untuk komoditas lada, casia vera, pala, panili dan minyak atsiri. Namun jika dibandingkan dengan beberapa negara pesaing produktivitas kita termasuk rendah. Hal ini disebabkan karena tingkat teknologi, baik produksi maupun pasca panen, serta peremajaan tanaman rakyat yang belum dilaksanakan dengan baik. Penguasaan teknologi yang terbatas tersebut menyebabkan kurangnya diversifikasi produk yang diekspor. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa ekspor hasil pertanian masih dalam bentuk bahan mentah, padahal dengan mengolah komoditas hasil pertanian menjadi barang setengah jadi melalui industri pengolahan, baik skala kecil maupun dalam skala menengah di pedesaan, akan tercipta mata rantai dalam negeri yang semakin panjang dan memberikan dampak positif terhadap usaha-usaha peningkatan nilai tambah, peningkatan pendapatan petani dan pengrajin, perluasan kesempatan berusaha serta menciptakan tambahan lapangan kerja.

Untuk memberikan dukungan yang penuh terhadap perkembangan agribisnis, kendala-kendala yang masih melekat pada sektor pertanian harus segera dapat diatasi. Kendala tersebut antara lain pola produksi dengan skala usaha kecil dan terpisah-pisah sehingga tidak menguntungkan, beragamnya varietas yang ditanam, serta cara penanganan pra maupun pasca panen yang belum memadai menyebabkan kualitas hasil produksi yang tidak seragam. Selain itu jumlah produksi juga berfluktuasi sehingga industri pengolahan tidak memperoleh jaminan kesinambungan bahan baku. Hal ini sangat penting untuk pengolahan hortikultura maupun minyak atsiri, terutama yang berorientasi ekspor.

Di samping masalah tersebut di atas, kemampuan pembentukan modal untuk membiayai pengembangan agribisnis khususnya pada masyarakat pedesaan masih terbatas. Walaupun beberapa alternatif pola kredit tersedia bagi petani di pedesaan, namun akses petani kecil masih belum memadai untuk dapat memanfaatkan piranti finansial tersebut.



Biaya pengangkutan yang tinggi, perkembangan industri pengolah yang belum memadai dan masih lemahnya informasi pasar menyebabkan sistem pemasaran yang ada menjadi kurang efisien. Hal ini pada gilirannya akan meningkatkan biaya pemasaran, sehingga harga yang diterima oleh petani menjadi rendah.

Dari segi kelembagaan petani, sebagian kelompok tani di daerah sentra produksi hortikultura masih dalam kelas pemula dan lanjut, sehingga dinamika kelompok belum begitu berkembang. Demikian pula halnya dengan kelembagaan penyuluhan, beserta peralatan yang dimilikinya belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk penyuluhan hortikultura dan rempah-rempah. Belum melembaganya secara operasional kaitan antara institusi penelitian dan penyuluhan menyebabkan proses alih teknologi kepada petani belum berjalan sesuai dengan harapan.

**Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,**

Dalam era pembangunan saat ini, kita tidak dapat memungkiri bahwa kesenjangan merupakan salah satu masalah yang jelas meminta perhatian khusus untuk diantisipasi sedini mungkin, agar hal ini tidak menjadi batu sandungan di dalam upaya kita mencapai pembangunan manusia seutuhnya menuju masyarakat adil dan makmur. Salah satu faktor yang menyebabkan kesenjangan antara pengusaha yang kuat dan yang lemah adalah kegagalan pasar. Dari pengalaman selama ini dapat ditunjukkan bahwa perkembangan ekonomi yang mengandalkan pada kekuatan pasar, ternyata proporsi terbesar dari manfaat yang ditimbulkannya justru dinikmati oleh masyarakat ekonomi menengah ke atas. Masyarakat ekonomi lemah, termasuk petani kecil, tidak terjangkau oleh dampak positif dari sistem ini. Hal ini disebabkan ketidakmampuan mereka dalam menangkap sinyal-sinyal pasar yang ada. Apabila hal ini terus berlanjut, tentunya akan makin memperlebar kesenjangan di antara masyarakat.

Dengan latar belakang kondisi tersebut di atas, maka implikasi yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan agribisnis adalah upaya-upaya untuk memelihara keluwesan alokasi dan penekanan investasi yang harus senantiasa didasarkan pada komposisi serta kualitas sumberdava alam yang berbeda-beda dari



suatu daerah ke daerah yang lain. Dengan demikian untuk menjamin suatu pertumbuhan perekonomian sosial yang serasi, harmonis, dan seimbang, maka diperlukan suatu perangkat kebijaksanaan perekonomian makro yang sangat memperhatikan karakteristik sektor pertanian guna dapat lebih menjamin agar sektor pertanian akan tetap berperan-serta secara optimal dalam pembangunan bangsa dari masa ke masa.

Untuk mencapai tujuan yang dimaksud dan sejalan dengan karakteristik struktur perekonomian kita di masa depan, maka sementara keterlibatan pemerintah semakin berkurang, pada saat yang sama investasi pihak swasta diharapkan dapat mengisi peran pemerintah tersebut. Untuk itu dibutuhkan kondisi yang mampu menciptakan mitra kerja yang serasi antara swasta dan petani. Dalam hal ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain : (a) Aturan main yang disepakati oleh kedua faktor ekonomi ini harus transparan; (b) Adanya kejelasan serta kepastian mengenai pembagian hasil maupun dalam menanggung resiko; dan (c) Kerja sama tersebut harus mampu mendorong kemandirian petani. Hubungan dua arah yang serasi tersebut akan lebih mendorong perkembangan agribisnis yang optimal, apabila juga dilandaskan pada pola pemikiran yang senantiasa mengacu kepada keunggulan komparatif yang berakar kuat kepada kekuatan komposisi serta kualitas sumberdaya kita sendiri, sehingga keberlanjutannya dapat terus terjamin.

Sejalan dengan itu, strategi pengembangan agro-industri yang berlandaskan pada pola pemikiran tersebut di atas diharapkan dapat menumbuhkan industri pedesaan yang mampu memacu pertumbuhan ekonomi pedesaan yang berimbang, meningkatkan nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja, serta pemilihan lokasi industri yang efisien dan sesuai dengan tipe maupun ukuran industri yang dimaksud. Dengan demikian untuk selanjutnya diharapkan akan muncul suatu pola dan struktur produk pertanian yang berdiversifikasi. Sumbangan nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja agro-industri tersebut dapat langsung dinikmati masyarakat pedesaan.



**Saudara-saudara yang saya hormati,**

Demikianlah, secara ringkas telah saya utarakan cakupan arah kepentingan agribisnis dan agro-industri dalam pembangunan pertanian yang diharapkan dapat memacu perkembangan pertanian khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya. Besar harapan saya bahwa dari workshop ini akan dihasilkan gagasan-gagasan yang dapat semakin memantapkan semangat kita untuk mengerahkan segala potensi yang ada demi tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Terima kasih saya ucapkan atas perhatian Saudara-Saudara sekalian, dan dengan ini saya nyatakan workshop ini dibuka.

**Wassallamu'alaikum Warokhmatullohi Wabarohkatuh.**

**Menteri Muda Pertanian**

**Dr. Sjarifudin Baharsjah**



Selain itu, sifat-sifat industri demikian pada dasarnya mempunyai dampak penggandaan ("multiplier effect") yang sangat besar, yang terutama akan ditangkap dan dinikmati masyarakat maupun wilayah yang bersangkutan. Oleh karenanya, agar agro-industri tersebut dapat berkembang secara efisien di daerah pedesaan, diperlukan reorientasi program pengembangan sentra (seluruh) komoditas pertanian dengan dukungan sarana dan prasarana yang diperlukan.

**Saudara-saudara yang saya hormati,**

Program-program pembangunan pertanian pemerintah senantiasa memperhatikan masalah penanggulangan kemiskinan, oleh karena itu upaya peningkatan produksi hortikultura dan rempah-rempah juga dilaksanakan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Pada tahun 1991-1992 Departemen Pertanian melaksanakan program terobosan pembangunan pertanian di daerah miskin dengan dana yang cukup besar diantaranya mencakup pengembangan produksi hortikultura. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan produktivitas sumberdaya pertanian melalui investasi di sektor pertanian yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. Sasaran dari kegiatan ini adalah kelompok masyarakat berpenghasilan rendah diantaranya mereka yang berada di daerah lahan kering, lahan pasang surut, daerah sekitar waduk dan pantai. Pengembangan komoditas akan disesuaikan dengan potensi sumberdaya setempat. Dalam pelaksanaannya kegiatannya meliputi pengolahan tanah, pengadaan bibit, bimbingan usahatani termasuk penyuluhan dan perlindungan tanaman. Diantara bibit yang akan dibagikan adalah buah-buahan, sayuran, kemiri, dan asam jawa disamping komoditas-komoditas pangan, peternakan, perikanan, dan komoditas perkebunan lainnya. Program tersebut akan mencakup areal seluas lebih dari 30.000 Ha dan lahan pekarangan yang akan melibatkan sekitar 16.000 kepala keluarga meliputi 17 propinsi.



**Saudara-saudara yang saya hormati,**

Demikianlah, secara ringkas telah saya utarakan cakupan arah kepentingan agribisnis dan agro-industri dalam pembangunan pertanian yang diharapkan dapat memacu perkembangan pertanian khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya. Besar harapan saya bahwa dari workshop ini akan dihasilkan gagasan-gagasan yang dapat semakin memantapkan semangat kita untuk mengerahkan segala potensi yang ada demi tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Terima kasih saya ucapkan atas perhatian Saudara-Saudara sekalian, dan dengan ini saya nyatakan workshop ini dibuka.

**Wassallamu'alaikum Warokhmatullohi Wabarohkatuh.**

**Menteri Muda Pertanian**

**Dr. Sjarifudin Baharsjah**



**BERBAGAI POTENSI DAN KENDALA DARI  
UNIT PEMUKIMAN TRANSMIGRASI DIKAITKAN  
DENGAN PENGEMBANGAN AGRIBISNIS**

Oleh :  
**Sjarifudin Baharsjah**

**Departemen Pertanian  
1991**



**BERBAGAI POTENSI DAN KENDALA DARI  
UNIT PEMUKIMAN TRANSMIGRASI DIKAITKAN  
DENGAN PENGEMBANGAN AGRIBISNIS**

Oleh :  
Sjarifudin Baharsjah

Departemen Pertanian  
1991



**BERBAGAI POTENSI DAN KENDALA DARI UNIT  
PEMUKIMAN TRANSMIGRASI DIKAITKAN DENGAN  
PENGEMBANGAN AGRIBISNIS**

**I. Pendahuluan**

Pembangunan ekonomi nasional yang tengah dilaksanakan telah mulai memasuki tahapan akhir Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun pertama (Bangkajang-I). Sebagai negara yang kaya dengan sumber daya hayatinya, peran sentral sektor pertanian dalam pembangunan nasional dirasakan masih cukup strategis mengingat sebagian besar masyarakatnya berada di daerah pedesaan, bekerja, dan mendapatkan nafkah di sektor pertanian.

Untuk lebih memantapkan peran sektor pertanian sebagai motor penggerak pembangunan perkonomian nasional, Pemerintah telah bertekad untuk menempatkan pengembangan sektor agribisnis pada posisi sentral dalam pembangunan pertanian dengan tetap berbasis di daerah-daerah pedesaan baik yang sudah mapan maupun yang masih harus memanfaatkan dorongan aktifitas lebih lanjut. Salah satu upaya pengembangan wilayah pedesaan tersebut adalah melalui pelaksanaan transmigrasi.

Pelaksanaan transmigrasi dari waktu ke waktu telah memperlihatkan kemajuan yang memberi harapan di masa mendatang, terutama jika dilihat dari jumlah petani yang berhasil dipindah tempatkan selama Repelita IV yaitu mencapai sekitar 750 ribu



keluarga atau 1,5 kali lebih banyak daripada Repelita III, belum terhitung jumlah transmigrasi swakarsa yang dikaitkan dengan Perusahaan Inti Rakyat (PIR) perkebunan; sementara luas lahan yang dibuka untuk usaha pertanian di daerah transmigrasi tercatat kurang lebih 538 ribu hektar. Usaha pengembangan industri yang mengolah hasil-hasil pertanian di daerah itu merupakan sebagian daripada program transmigrasi guna meningkatkan pendapatan petani, baik lokal maupun pendatang, melalui nilai tambah yang diperolehnya atas produk tersebut yang pada gilirannya dapat turut meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Makalah ini menitik beratkan pada kaitan pengembangan agribisnis dengan potensi dan kendala dari unit pemukiman transmigrasi, berikut strategi pengembangannya.

## II. Peran Agribisnis Dalam Pembangunan Nasional

Pengertian agribisnis meliputi semua aktifitas mulai dari pengadaan dan penyaluran sarana produksi sampai kepada pemasaran produk-produk yang dihasilkan oleh usaha tani atau komoditi olahan. Dengan demikian, agribisnis merupakan suatu sistem yang terdiri dari:

- (1) Subsistem pengadaan dan penyaluran sarana produksi
- (2) Subsistem usaha tani/produksi
- (3) Subsistem pengolahan hasil-hasil pertanian
- (4) Subsistem pemasaran



Oleh karena sistem ini merupakan suatu runtut kegiatan yang berkesinambungan mulai dari sektor hulu sampai kepada sektor hilirnya, maka keberhasilan pengembangan agribisnis ini sangat bergantung kepada kemajuan-kemajuan yang dapat dicapai pada setiap simpul yang menjadi subsistemnya.

Di dalam struktur perekonomian Indonesia dewasa ini, bidang agribisnis pada hakekatnya memiliki spektrum yang sangat luas, mulai dari usaha tani yang dikelola oleh mayoritas keluarga-keluarga dengan sumberdaya yang sangat terbatas, sampai dengan tingkatan perusahaan yang bersifat multinasional. Kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) cukup besar yaitu sekitar 29%.

II  
Ada beberapa alasan strategis yang dapat dijadikan landasan untuk ~~meletakkan~~ <sup>menetapkan</sup> ~~harapan~~ <sup>harapan</sup> pada kegiatan agribisnis dalam <sup>kerb</sup> pembangunan ekonomi nasional.

Pertama, keharusan mencari sumber pertumbuhan ekonomi yang mampu memanfaatkan keterkaitan pertumbuhan antar sektor. Dalam hal ini, kegiatan agribisnis dinilai mempunyai peran yang strategis dalam fungsinya sebagai perekat bidang singgung antara sektor pertanian dengan sektor-sektor lainnya. Pada tingkat perekonomian nasional saat ini, pertumbuhan sektor pertanian tidak akan dapat dipercepat tanpa mengindahkan keterkaitan tersebut. Salah satu sebab mengapa alokasi penggunaan sumber daya nasional dalam meningkatkan nilai tambah komoditi ekspor pertanian tradisional masih belum optimal adalah di sebabkan



keterbatasan dalam meraih kesempatan dan peluang pasar yang ada. Keterbatasan tersebut tidak akan dapat didobrak bilamana kegiatan disektor pertanian hanya berorientasi kepada kegiatan produksi saja.

*lapangan kerja*

Kedua, secara nasional terdapat kebutuhan yang cukup mendesak dalam menyiapkan lapangan kerja baru guna mengantisipasi tambahan jumlah angkatan kerja yang terus meningkat setiap tahunnya. Kegiatan agribisnis merupakan kegiatan "multi-faset" sebab keberadaannya pada berbagai tingkat memungkinkan pengembangannya sampai kedaerah pedesaan. Oleh karena itu, melalui rekayasa pengembangan yang tepat, kegiatan agribisnis berpotensi tinggi untuk menampung dan bahkan menciptakan lapangan kerja baru. Dalam hubungan ini, terdapat paling tidak dua tantangan. Kualitas surplus tenaga kerja yang meninggalkan sektor pertanian karena tertarik kepada aktifitas ekonomi yang memberikan arus pendapatan lebih baik harus dapat ditingkatkan. Pada saat yang sama, kualitas tenaga kerja yang memilih menetap di sektor pertanian pun harus pula ditingkatkan apabila produktivitasnya diharapkan mampu bersaing dengan produktivitas tenaga kerja disektor lain.

Ketiga, secara nasional juga terdapat kepentingan untuk menciptakan landasan yang kokoh bagi perluasan ekspor non migas yang berakar kepada keunggulan komparatif yang dimiliki. Dalam pada itu, terobosan terhadap pasar dunia selama ini sangat terbatas hal ini disebabkan sebagian besar hasil-hasil pertanian nasional masih diekspor dalam bentuk barang mentah maupun setengah jadi. Sementara spektrum potensi permintaan pasar yang



dapat diraih masih sangat terbuka bilamana hasil-hasil pertanian itu diekspor dalam bentuk olahan. Pemikiran untuk mengembangkan kegiatan agribisnis antara lain didasarkan kepada potensinya dalam meningkatkan nilai tambah produksi hasil-hasil pertanian nasional, bukan saja terbatas pada tingkat petani, tetapi juga sampai ketinggian perdagangan internasional.

Keempat, hal lain yang tidak kurang pentingnya adalah pangsa produsen bahan mentah, terutama sekali bagi petani dan pekebun dalam meraih pendapatan dari proses nilai tambah perlu diperbesar. Kebutuhan ini erat kaitannya dengan upaya untuk senantiasa memodernisasikan sektor pertanian agar dapat selalu bersaing dan mampu mengantisipasi setiap perkembangan yang terjadi disektor lain.

Akhirnya, suatu hal yang juga tidak dapat dikesampingkan adalah bahwa kegiatan agribisnis sangat . mengandalkan keberadaan sumber daya alam yang memiliki karakteristik dasar sebagai sumber daya yang senantiasa dapat diperbaharui ("renewable resources"). Karakteristik itu merupakan modalitas yang penting untuk ditonjolkan sebab dengan demikian kelangsungan kegiatan ekonominya senantiasa dapat dipertahankan, tanpa mengurangi keberadaan dan mutu sumber daya alam pertanian nasional.



*Emosi pejabat dit. loby*

III. Persyaratan Bagi Unit Pemukiman Transmigrasi Sebagai  
Pusat Pengembangan Agribisnis

*unit pemukiman*

Seperti diungkapkan di atas bahwa agribisnis, dengan karakteristik yang dimilikinya, mempunyai keunggulan komparatif sebagai basis ekonomi didalam mendorong pembangunan pedesaan. Untuk meraih keunggulan komparatif tersebut secara optimal khususnya didalam pengembangan pedesaan di wilayah transmigrasi, kegiatan ini harus ditunjang oleh berbagai prasyarat-prasyarat tertentu. Antara lain tersedianya fasilitas infrastruktur yang memadai yang meliputi jalan penghubung, poros, dan jalan desa. Bagi daerah pasang surut, di samping jembatan, perlu dibangun dermaga pada saluran primer dan sekunder yang dapat dimanfaatkan sebagai jalur penghubung antara wilayah produksi dengan wilayah pasar.

Persyaratan berikutnya yang dirasakan sangat mendasar adalah tersedianya lembaga finansial yang dapat dijangkau oleh para petani trans dan pelaku ekonomi lainnya. Adanya lembaga finansial yang ditunjang oleh iklim ekonomi yang kondusif, mempunyai potensi yang cukup besar untuk memainkan peran yang penting dalam menunjang pengembangan agribisnis di unit Pemukiman Transmigrasi, karena sektor ini dapat berperan sebagai pelancar mata rantai kegiatan antara sektor produksi dengan industri pengolahan. Dengan berkembangnya sistem kelembagaan finansial tersebut di atas, maka roda pembangunan pertanian di wilayah tersebut benar-benar akan berjalan selaras dengan pembangunan sektor industri.



Agar lembaga finansial dapat menunjang pengembangan kegiatan agribisnis di unit-unit pemukiman transmigrasi ini, maka kemampuan dan peranan koperasi seyogyanya lebih diorientasikan sebagai ujung tombak aktifitas ekonomi di daerah pemukiman tersebut. Oleh karenanya, keberadaan tenaga-tenaga profesional untuk menangani pengelolaan koperasi di wilayah ini, mutlak dibutuhkan guna meningkatkan kepercayaan berbagai pihak baik swasta atau badan usaha milik negara dalam berkerjasama dengan pihak koperasi.

Di samping itu, sudah waktunya bagi kita untuk merumuskan suatu kebijaksanaan finansial yang menyeluruh, sehingga : (a) Kredit yang dibutuhkan oleh para transmigran mudah didapat, sederhana prosedurnya, lokasinya mudah dijangkau; (b) Jangka waktu kredit seyogyanya disesuaikan dengan kemampuan para transmigran dan pelau ekonomi lainnya; (c) Lembaga finansial (BPR) sebaiknya harus merupakan lembaga yang mantap, sehingga dapat dipercaya oleh para transmigran yang umumnya belum kenal akan manfaat dan peranan lembaga finansial dalam pembangunan ekonomi pedesaan; dan (d) Dalam penyediaan kredit untuk masyarakat transmigrasi perlu dikembangkan pendekatan yang lebih responsif terhadap permintaan.

Keberhasilan pengembangan agribisnis tidak dapat dilepaskan dari tersedianya teknologi tepat guna. Untuk itu, kegiatan penelitian, baik penelitian yang diarahkan untuk menghasilkan paket-paket teknologi, penelitian yang menghasilkan bahan untuk menyusun paket kebijaksanaan ataupun penelitian yang menghasilkan informasi bagi pengembangan ilmu dan teknologi itu sendiri, perlu terus ditingkatkan.



Kondisi pertanian dan pedesaan yang bervariasi menurut unit pemukiman transmigrasi menuntut pemilihan dan perakitan teknologi yang sesuai dengan kondisi dan lingkungan setempat. Dalam kaitan ini perakitan teknologi haruslah bersifat tepat guna dalam arti paket teknologi yang mampu meningkatkan pemanfaatan, pengelolaan sumberdaya alam secara optimal, peningkatan produksi, mutu hasil dan meningkatkan nilai tambah. Untuk itu penerapan teknologi harus disesuaikan dengan kondisi agro ekosistem setempat.

Perakitan teknologi yang spesifik lokasi (agro ekosistem) dilakukan dengan pendekatan sistem usahatani. Dengan demikian paket yang direkomendasikan bersifat terpadu memperhatikan kaitan antar berbagai komponen dalam sistem usahatani yang unik. Hal ini juga menghindari kegagalan paket teknologi karena tidak sesuai atau bertentangan dengan tatanan sistem yang sudah mapan.

Kondisi pertanian dan pedesaan di Indonesia cenderung masih bersifat subsisten, tradisional dan berskala kecil. Oleh karenanya teknologi tepat guna tersebut harus merupakan suatu paket teknologi yang berciri skala kecil, mempunyai daya serap tenaga kerja besar dan memerlukan investasi yang relatif kecil.

Macam teknologi akan memberikan pengaruh terhadap pengembangan agrobisnis di unit pemukiman transmigrasi adalah: (a) teknologi untuk meningkatkan produktifitas, (b) teknologi untuk menghemat faktor produksi atau menurunkan faktor produksi, (c) teknologi untuk meningkatkan kualitas hasil, nilai tambah dan membuka peluang pasar baru, serta (d) rekayasa sosial yang berupa perangkat lunak sebagai penggerak kegiatan berproduksi dan penerapan teknologi, seperti pengorganisasian, kelembagaan dan pengelolaan.



Dalam penciptaan teknologi untuk meningkatkan produktifitas, akan terus diupayakan peningkatan kemampuan dan rekayasa genetik, dan teknologi budaya. Sebagai contoh pada komoditi padi penciptaan varietas unggul baru diperlukan untuk menghilangkan ketergantungan terhadap varietas-varietas tertentu. Pada palawija rakitan teknologi diperlukan untuk meningkatkan produktifitas komoditi, terutama komoditi-komoditi yang masih menggantungkan kepada impor seperti kedele.

Dalam rangka meningkatkan produktivitas tenaga kerja, teknologi mekanik juga perlu terus dikembangkan. Penerapannya sudah sangat mendesak terutama di daerah-daerah dengan intensitas tanam yang tinggi namun dihadapkan dengan kelangkaan tenaga kerja. Untuk mengurangi dampak negatifnya terhadap kehilangan kesempatan kerja buruh tani, pengembangan teknologi mekanik ini masih perlu dilakukan secara selektif di beberapa daerah tertentu.

Tidak kalah pentingnya adalah penciptaan teknologi yang bersifat rekayasa sosial dalam menciptakan suatu sistim pengorganisasian, kelembagaan dan pengelolaan usahatani. Sistim pengelolaan seperti Insus, Supra Insus dan Opsus telah memperlihatkan hasilnya dalam merangsang produksi tanamanpangan. Di bidang perkebunan telah pula diberlakukan sistim Tebu Rakyat (TRI) dan PIR Bun.



Penerapan teknologi dan upaya peningkatan produksi haruslah pula memperhatikan azas-azas kelestarian lingkungan. Contoh yang jelas paket teknologi yang berwawasan lingkungan adalah Pemberantasan Hama Terpadu (PHT). Dalam pendekatan ini, pengganggu tanaman dapat dikurangi sekecil mungkin tanpa merusak kelestarian sumberdaya biotik.

#### IV. Potensi dan Kendala Unit Pemukiman Transmigrasi Dalam Pengembangan Agribisnis

##### **Potensi**

##### 1. Sumber daya lahan

Sumber daya alam yang sangat mendukung sektor pertanian adalah lahan. Dari 191,9 juta Ha luas daratan Indonesia, maka seluas 133,7 juta ha atau 69,7% secara fisik memiliki daya dukung yang memungkinkan untuk budidaya pertanian.

Sebaran potensi lahan tersebut mencakup 8,6% di Pulau Jawa, Madura dan Bali; sedangkan sisanya diluar Jawa. Tingkat penggunaan lahan untuk Pulau Jawa 84% telah dimanfaatkan, sementara pemanfaatan lahan diluar Jawa baru mencapai 22% dari potensi yang tersedia.

Dalam upaya pemanfaatan sumber daya lahan ini disamping akan terus mengoptimalkan potensi yang ada, juga akan dilakukan upaya perbaikan lahan-lahan kritis. Untuk itu sejak pertengahan Pelita



IV telah dirintis pengembangan perkebunan didaerah kristis diantaranya PIR lokal Coklat Wonogiri dan PIR lokal di Danau Diatas di Propinsi Sumatera Barat, PIR lokal Parsoburan di Sumatera Utara, serta pengembangan coklat didaerah Gunung Kidul.

Luas lahan yang dibuka untuk usaha didaerah transmigrasi selama Repelita IV tercatat kurang lebih 538 ribu ha. Jumlah itu belum termasuk lahan usaha yang dibuka sendiri oleh petani transmigran. Selain itu, tersedia pula daerah pasang surut dan irigasi yang sudah dibangun salurannya berikut "drainase"-nya yang dapat dimanfaatkan guna menampung transmigran.

Selama Repelita V luas lahan yang direncanakan akan dibuka untuk program transmigrasi diperkirakan sekitar 355 ribu ha berikut 137,5 ribu ha untuk penyiapan dan pembangunan prasarana dan sarana umum.

## 2. Sumberdaya Manusia

Salah satu faktor utama yang sangat menentukan keberhasilan pengembangan agribisnis di Indonesia adalah tersedianya tenaga terampil yang memadai untuk setiap subsistem agribisnis. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pembangunan transmigrasi hendaknya kualitas sumber daya manusia tersebut perlu diperhatikan agar pengembangan agribisnis di unit pemukiman transmigrasi dapat mencapai target yang diharapkan.



Selama periode 1977 - 1987 laju pertumbuhan tenaga kerja di Indonesia tumbuh dengan laju 2.98 % per tahun, dengan tambahan lapangan pekerjaan baru sebesar 14.1 juta tenaga kerja. Pada tahun 1987, jumlah tenaga kerja sebanyak 55,4 juta orang. Laju pertumbuhan tenaga kerja yang lebih tinggi terjadi di luar Pulau Jawa yang memiliki wilayah yang kurang subur, dan di sektor pelayanan. Di Jawa yang memiliki wilayah padat penduduk, laju pertumbuhan tenaga kerja pada sektor pertanian sangatlah kecil, hanya 0,22% per tahun, sementara itu di sektor industri pengolahan juga mengalami pertumbuhan yang kurang tinggi dibandingkan dengan sektor perdagangan dan pelayanan. Di luar Pulau Jawa, laju pertumbuhan tenaga kerja di sektor pertanian sebesar 6,1% per tahun, namun angka ini masih lebih rendah dibandingkan dengan total pertumbuhan wilayah, yaitu sebesar 6,25% per tahun.

Berdasarkan pada tingkat pendidikan yang dicapai, mutu angkatan kerja meningkat dengan jelas. Akan tetapi mutu tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian lebih rendah dibandingkan dengan yang bekerja di sektor non pertanian. Tahun 1976, proporsi tenaga kerja pertanian yang tidak memiliki pendidikan formal sebesar 34,7% dan pada tahun 1986, persentasenya berubah menjadi 24,2%. Sementara itu, proporsi tenaga kerja non pertanian dengan mutu yang sama menurun dari 22,0%, pada tahun 1976 menjadi 12,5% pada tahun 1986. Pada tahun 1986 hanya 5,5% dari tenaga kerja di sektor pertanian yang dapat menyelesaikan pendidikan Lanjutan Pertama ke atas. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan sektor non pertanian, yaitu sebesar 31,0%.



Pada Repelita V yang tengah berjalan direncanakan pemindahan sejumlah 550 ribu kepala keluarga transmigran baru dari pulau-pulau Jawa, Bali, propinsi Nusa Tenggara Barat dan Timur, serta Lampung ke daerah-daerah lain yang jarang penduduknya namun memiliki potensi alam yang cukup banyak.

**Kendala:**

**1. Masalah Transportasi :**

Sarana transportasi di daerah pemukiman transmigrasi masih merupakan kendala utama bagi pelaksanaan transmigrasi dalam menopang kegiatan agribisnis di wilayah pemukiman. Walaupun pada akhir-akhir ini telah dibangun prasarana transportasi seperti pembangunan jalan di wilayah transmigrasi serta penambahan jumlah sarana transportasi perintis, namun jumlahnya relatif kecil jika dibandingkan dengan jumlah pemukim. Pada akhir Repelita IV, jumlah sarana transportasi yang melayani daerah terpencil dan daerah transmigrasi hanya 170 buah, yang tersebar di 19 lokasi. Rasio panjang jalan dan luas pulau bagi Pulau-Pulau di luar Jawa relatif lebih kecil. Hal tersebut menyebabkan kontak antar daerah dan antar pulau menjadi kurang begitu lancar. Kurang lancarnya kontak tersebut, menyebabkan kelancaran arus informasi yang diterima di wilayah yang bersangkutan guna pengembangan sektoral termasuk pertanian dan pengembanga agribisnis didalamnya menjadi kurang memadai.



## 2. Masalah Pemasaran :

Selama ini perdagangan komoditi hasil-hasil pertanian Indonesia hampir seluruhnya didominasi oleh bahan baku industri hilir hasil pertanian yang harga jualnya relatif sangat rendah bila dibandingkan dengan produk olahan. Kenyataan ini memberi petunjuk bahwa nilai tambah dari hasil olahan jauh lebih besar daripada bahan mentahnya. Nilai tambah tersebut sebagian besar masih dinikmati oleh produsen lokal maupun asing, sementara itu petani hanya memperoleh sebagian kecil dari keuntungan totalnya.

Strategi pengembangan agribisnis melalui penempatan industri olahan yang didasarkan pada keunggulan komparatif sumberdaya di pedesaan merupakan alternatif pilihan karena ia dapat memberikan dampak ganda pada perekonomian nasional yang pada gilirannya akan dapat memberikan kontribusi nilai tambah kepada masyarakat khususnya petani di pedesaan. Dampak ganda tersebut akan dapat diraih secara optimal apabila dibarengi dengan upaya perbaikan pemasarannya. Sejalan dengan hal tersebut beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memasarkan komoditi hasil pertanian, terutama ke pasar luar negeri, adalah sebagai berikut:

- (1) meningkatkan dan menjaga mutu;
- (2) Persyaratan standar mutu komoditi itu kurang tepat jika hanya diserahkan kepada kemampuan produsennya, dalam hal ini petani, melainkan harus didasarkan kepada permintaan pasar;
- (3) Peningkatan kemampuan teknologi;
- (4) Perbaikan sistem informasi;
- (5) Pembentukan assosiasi untuk setiap jenis komoditi;
- (6) Dukungan kebijakan Pemerintah yang merangsang dan mempermudah

"access to market".



### 3. Masalah Kelembagaan Finansial:

Tersedianya lembaga finansial masih merupakan kendala dalam menunjang pengembangan agribisnis di unit-unit pemukiman transmigrasi . Sampai saat ini penanaman modal di sektor pertanian kurang diminati pihak swasta, karena investasi di sektor pertanian pada umumnya memiliki resiko yang cukup tinggi. Resiko tidak hanya muncul karena gejolak harga, akan tetapi juga dari proses produksi yang masih tergantung pada iklim. Teknologi memang telah banyak membantu mengurangi resiko itu, terutama dalam perlindungan terhadap hama dan penyakit, namun iklim tetap merupakan faktor ekstrim yang sulit dikendalikan. Tempo dan irama alamiah tidak dapat diubah terlalu banyak, sehingga jangka waktu tanaman belum menghasilkan (TBM) dan sifat musiman selalu harus diperhitungkan oleh penanam modal.

Aspek lain yang kelihatannya turut memperlambat arus penanaman modal di sektor pertanian adalah keharusan untuk sejak awal menerapkan pendekatan terpadu yang utuh. Pada umumnya produk cepat membusuk dan bervolume besar di banding nilainya. Penanganan pasaca panen, penyimpanan, pengolahan, pengangkutan, dan lancarnya pemasaran menjadi sangat penting. Bilamana penanam modal kurang mampu menerapkan prinsip integrasi vertikal dalam investasinya, ia harus tergantung kepada adanya investasi lain yang menjamin hadirnya semua mata rantai yang dibutuhkan agar produknya dapat dipasarkan dengan baik.



Koperasi simpan pinjam sebagai salah satu lembaga yang diharapkan dapat menjembatani kebutuhan finansial masyarakat di unit-unit pemukiman transmigrasi, belum mampu mencapai sasaran yang memuaskan. beberapa faktor penyebabnya adalah kurangnya ke trampilan dan lemahnya tatalaksana, sedangkan rendahnya pemupukan modal lebih disebabkan oleh masih rendahnya tingkat pendapatan transmigran.

Selain itu, masih kurangnya keberadaan Bank-Bank yang berorientasi melayani kebutuhan para petani langsung di daerah-daerah transmigran, seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Rakyat Indonesia. Daya dukung ke dua Bank dimaksud belum dapat sepenuhnya menjangkau daerah-daerah transmigran. Diharapkan dengan adanya seperangkat kebijaksanaan Paket Deregulasi, maka lembaga-lembaga yang memberi pelayanan perkreditan bertambah banyak dan kebutuhan masyarakat di daerah transmigrasi dapat mudah dipenuhi. Hal ini penting agar masyarakat tersebut tidak sampai jatuh kembali ke tangan para pelepas uang seperti pengijon dan rentenir, sebagaimana masa lalu.

#### 4. Masalah Kelembagaan:

Masalah koordinasi antar lembaga yang terkait merupakan salah satu masalah yang masih mewarnai dalam pelaksanaan pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) Trans. Permasalahan lainnya yang berkaitan dengan PIR Trans adalah : (1) masalah pemilihan lokasi; (2) masalah pra konversi yang antara lain meliputi seleksi petani, pembangunan sarana dan prasarana yang tidak sekali dua terlambat, koordinasi antar pihak yang terkait, masalah alih



teknologi dari inti ke plasma, kelayakan hidup petani selama masa pra konversi, dan penetapan komponen serta jumlah kredit petani plasma; dan (3) masalah pasca konversi yang antara lain meliputi masalah pembinaan petani, koordinasi pihak yang terkait, organisasi petani, kelangsungan hubungan inti-plasma dan kemampuan serta kelancaran petani plasma dalam membayar kredit

Masalah lainnnya yang cukup menonjol adalah belum berfungsinya KUD sebagai mata rantai kegiatan ekonomi di unit pemukiman transmigrasi. Kurang efektifnya fungsi KUD dapat menyebabkan "bargaining position" kelompok tani melemah khususnya dalam menghadapi hubungan inti-plasma. Sedangkan bagi perusahaan inti, kurang berfungsinya KUD akan berpengaruh terhadap kelancaran kegiatan pengadaan bahan baku, pemasaran, pembinaan dan koordinasi sesuai dengan tugas yang dibebankan pada perusahaan inti. Oleh karena itu, adalah kewajiban kita bersama untuk terus berupaya meningkatkan fungsi KUD sebagai motor penggerak perekonomian di wilayah pedesaan.

Hubungan antara BUMN, Swasta, dan Koperasi serta instansi pemerintah terkait belum mencapai tingkat optimal. Diharapkan dengan terbentuknya Komite Kerja Tetap (KKT) Departemen Pertanian - Perindustrian di tingkat Pusat yang melakukan penyerasian rencana pengembangan agroindustri sebagai bagian dari agribisnis, dan bersama dengan instansi terkait lainnya termasuk didalam Departemen Transmigrasi, kita akan mampu mengatasi kendala-kendala tersebut di atas.



## VI. Strategi Pengembangan Agribisnis Di Unit Pemukiman Transmigrasi

Seperti telah dirumuskan di dalam GBHN, pembangunan transmigrasi merupakan upaya pendayagunaan tenaga kerja dan penyebaran penduduk secara lebih merata dalam rangka memperbaiki mutu kehidupan, meningkatkan pendayagunaan sumber alam dan pembangunan daerah, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Dari rumusan mengenai tujuan pembangunan transmigrasi tersebut terlihat betapa luasnya jangkauan dan dampak yang diharapkan dari pelaksanaan pembangunan transmigrasi.

Pengembangan transmigrasi diharapkan dapat berdampak positif terhadap bidang demografi dan pertahanan serta keamanan nasional. Oleh sebab itu, pembangunan transmigrasi yang merupakan kegiatan lintas sektoral memerlukan kemampuan dan kesungguhan untuk melaksanakan koordinasi secara baik dan tepat agar berbagai tujuan yang diinginkan tersebut secara utuh dapat dicapai.

Pengertian transmigrasi khususnya dalam upaya pengembangan agribisnis seyogyanya tidak dijabarkan secara sempit sebagai pemindahan orang tak berlahan dari suatu tempat ke tempat lainnya, namun hendaknya lebih ditingkatkan lagi pada penekanan pengembangan kualitas sumberdaya manusia.

① Untuk memberikan hasil yang optimal, maka pengembangan agribisnis di unit transmigrasi seyogyanya diikuti dengan strategi pengembangan teknologi yang sesuai dengan kondisi dan



sumberdaya setempat dengan ditopang oleh adanya sarana infra struktur yang memadai.

② Untuk menunjang strategi tersebut, diperlukan adanya perubahan pola pikir konvensional yang senantiasa berorientasi pada produksi ke arah pola pikir yang berorientasi kepada bisnis. Disamping itu perlu diupayakan langkah-langkah konkrit untuk lebih mendekatkan unit pemukiman transmigrasi ("remote") sebagai wilayah produksi dengan pasar. Hal ini akan memungkinkan terjadinya aktivitas ekonomi yang lebih intensif dan dinamis di wilayah tersebut yang pada gilirannya diharapkan akan mempunyai dampak yang positif terhadap pendapatan petani trans dan masyarakat sekitarnya.

Faktor penunjang lainnya yang sangat strategis didalam upaya pengembangan agribisnis di unit Pemukiman Transmigrasi adalah

③ adanya lembaga finansial yang fleksibel yaitu yang tidak hanya mampu beradaptasi dengan kegiatan sektor ekonomi di tingkat menengah ke atas, tetapi juga yang mampu menyesuaikan diri dengan kondisi kegiatan ekonomi di wilayah tersebut.

④ Agar pengembangan agribisnis di unit Pemukiman Transmigrasi dapat memberikan nilai tambah kepada petani, perlu diupayakan pembinaan kelembagaan usaha tani (mulai dari tingkat kelompok tani sampai ketinggian KUD) yang mampu menjembatani dan memperjuangkan kepentingan petani ("bargaining position") didalam rangkaian kegiatan agribisnis tersebut, khususnya dalam menghadapi sektor swasta/BUMN sebagai mitra usaha.



5

Semua strategi tersebut di atas akan terlaksana dengan baik apabila kita mampu mendorong keterlibatan sektor swasta/BUMN secara dini didalam pengembangan agribisnis di unit Pemukiman Transmigrasi ini. Untuk itu diperlukan adanya seperangkat kebijaksanaan makro, investasi, harga yang dapat merangsang keterlibatan aktor ekonomi tersebut di daerah ini.

--- oo000oo ---

D:Surat C Umum/f:Transto2/Task Force Team/MOA  
Rakernas Dep. Trans/Jkt/100691



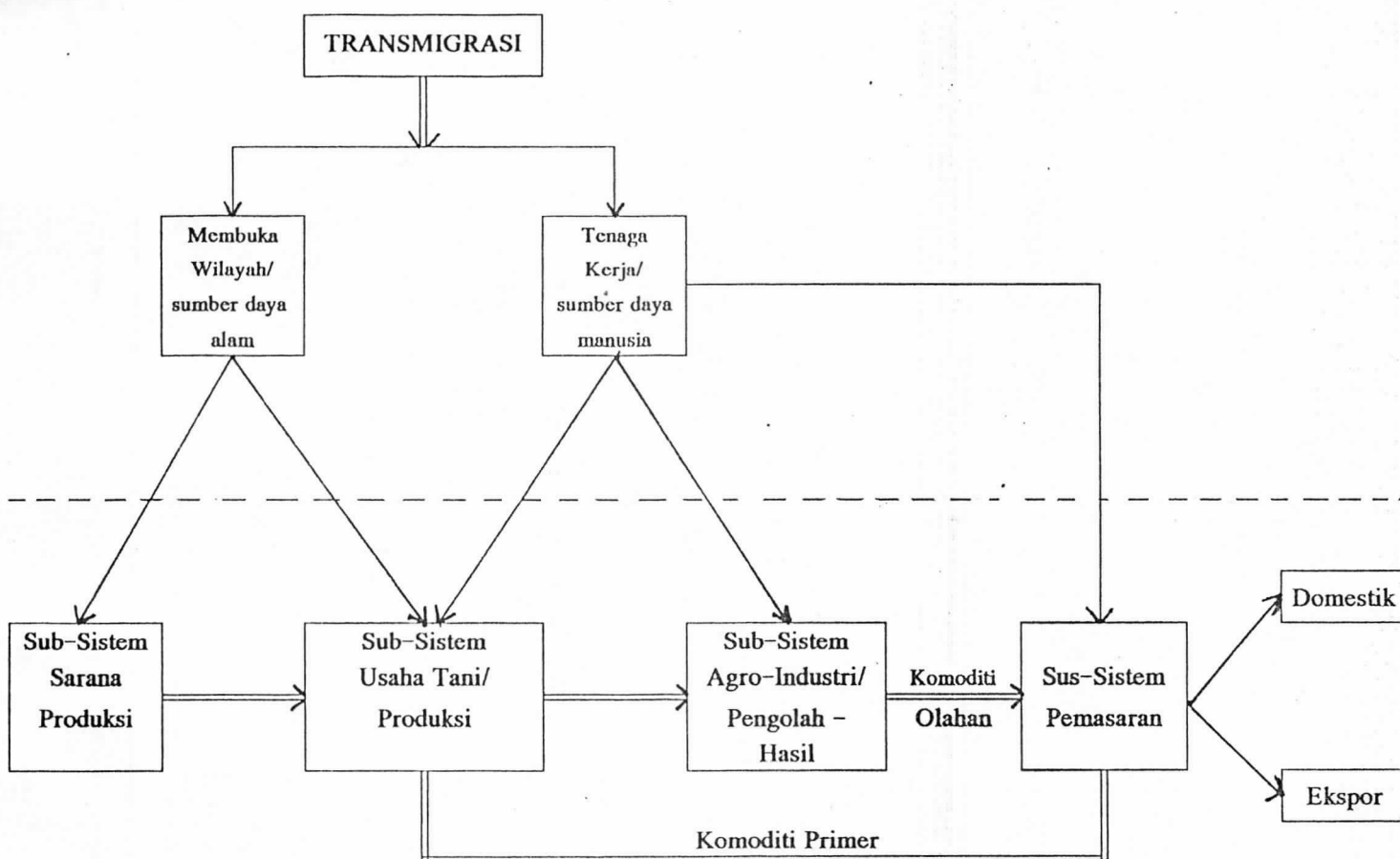
## MENGAPA AGRIBISNIS PENTING ?

1. Untuk Mencari Sumber Pertumbuhan Baru.
2. Untuk Menciptakan Kesempatan Kerja Dan Berusaha.
3. Untuk Menciptakan Landasan Yang Kokoh Bagi Perluasan Ekspor Non-Migas.
4. Untuk Meningkatkan Nilai Tambah.
5. Untuk Memanfaatkan Dan Melestarikan Sumber Daya Alam.



# KAITAN TRANSMIGRASI DENGAN KEGIATAN AGRIBISNIS

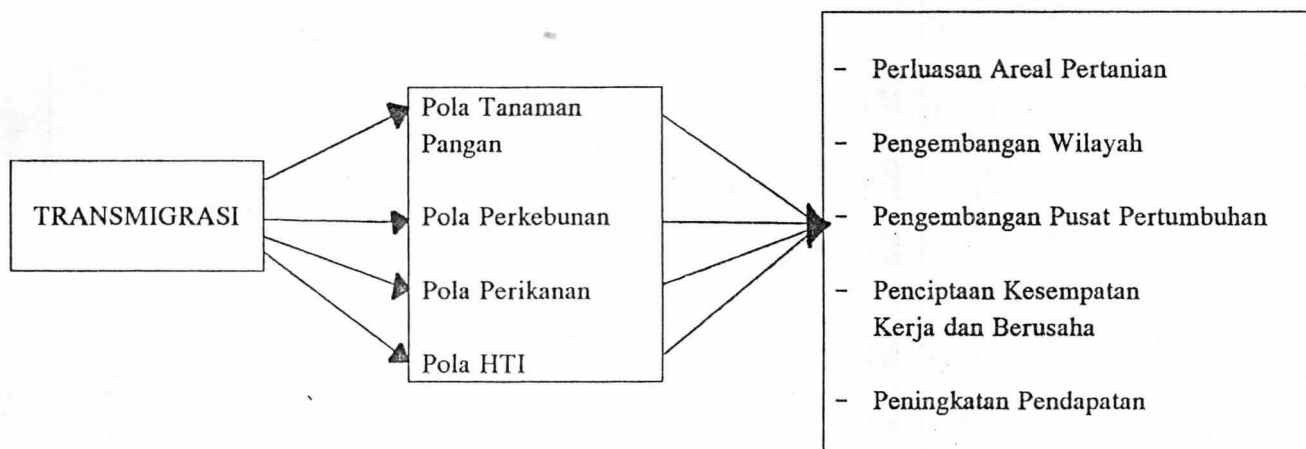
## SEKTOR TRANSMIGRASI



## SEKTOR AGRIBISNIS



# PERAN TRANSMIGRASI DALAM PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN NASIONAL



**BERBAGAI POTENSI DAN KENDALA DARI  
UNIT PEMUKIMAN TRANSMIGRASI DIKAITKAN  
DENGAN PENGEMBANGAN AGRIBISNIS**

Oleh :  
Sjarifudin Baharsjah

Departemen Pertanian  
1991



PERSYARATAN BAGI UNIT PEMUKIMAN  
TRANSMIGRASI SEBAGAI PUSAT  
PENGEMBANGAN AGRI-BISNIS

---

*1. DUKUNGAN INFRA-STRUKTUR*

*2. DUKUNGAN LEMBAGA FINANSIAL*

*3. DUKUNGAN TEKNOLOGI*



## 1. DUKUNGAN INFRA-STRUKTUR

### a. Tersedianya Sarana transmigrasi/perhubungan :

- Jalan Penghubung
- Jalan Poros
- Jalan Desa

### b. Tersedianya saluran primer dan sekunder yang dapat berfungsi sebagai jalur penghubung bagi daerah pasang surut

### c. Fasilitas Umum :

- Sekolah
- Rumah Ibadah
- Air bersih
- Balai Desa
- Listrik

### d. Keterjangkauan Pasar



## 2. *DUKUNGAN LEMBAGA FINANSIAL :*

- Kredit bunga ringan
- Lokasinya mudah dijangkau
- Prosedur sederhana
- Jangka waktu Kredit disesuaikan dengan kemampuan Transmigran dan pelaku lainnya
- Pendekatan lebih responsif



### *3. DUKUNGAN TEKNOLOGI*

- Teknologi Budidaya
- Teknologi Pengolahan
- Teknologi Pengemasan
- Teknologi Pengapalan (Shipment)



# POTENSI UNIT PEMUKIMAN TRANSMIGRASI DALAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS

1. Sumber daya alam
2. Sumber daya manusia
3. Infra-struktur



## 1. Sumber daya alam

- Pola Tanaman Pangan : 450,000 Ha
- Pola Perkebunan : 446,000 Ha
- Pola Perikanan : 7,500 Ha
- Pola HTI : 20,000 Ha

Sumber: Repelita V



## 2. Sumber daya manusia

- Pola Tanaman Pangan : 225,000 KK
- Pola Perkebunan : 223,000 KK
- Pola Perikanan : 15,000 KK
- Pola HTI : 40,000 KK

Sumber: Repelita V



### 3. Infra – Struktur

- Jalan
- Jembatan
- Saluran Irigasi
- Fasilitas Umum

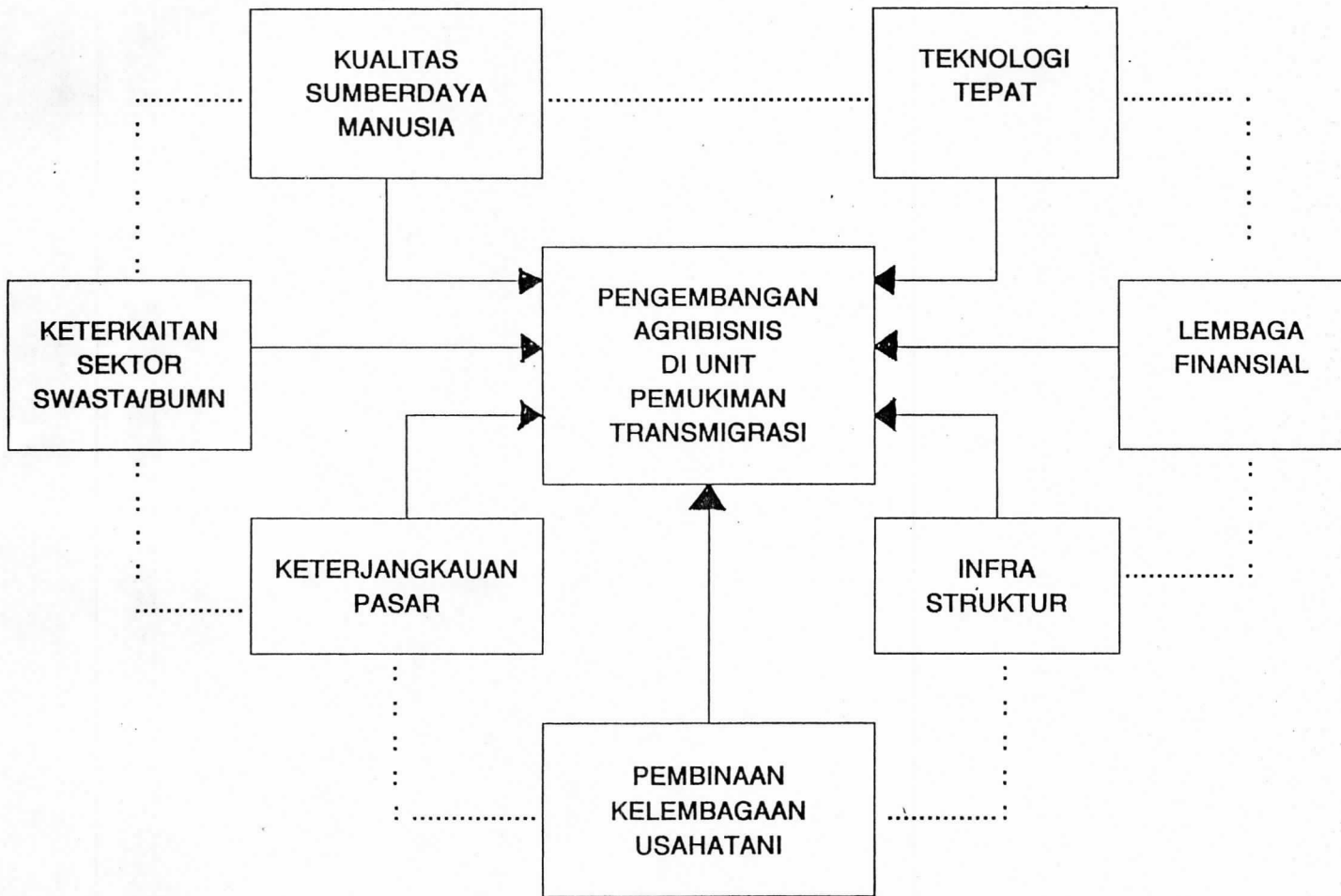


## KENDALA

- Fasilitas Transportasi
- Fasilitas Pemasaran
- Lembaga Finansial
- Kelembagaan penunjang lainnya



# STRATEGI PENGEMBANGAN AGRIBISNIS DI UNIT PEMUKIMAN TRANSMIGRASI



**PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI  
BAGI PEDESAAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN  
AGRO INDUSTRI**

Oleh :  
**Sjarifudin Baharsjah**

**DEPARTEMEN PERTANIAN  
1991**



**PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI  
BAGI PEDESAAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN  
AGRO INDUSTRI**

Oleh :  
Sjarifudin Baharsjah

**DEPARTEMEN PERTANIAN  
1991**



**PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI BAGI PEDESAAN  
DALAM RANGKA PENGEMBANGAN AGRO INDUSTRI 1)**

Oleh :

Sjarifudin Baharsjah

**I. PENDAHULUAN**

Dalam struktur ekonomi Indonesia, sektor pertanian, Indonesia masih memegang peranan penting. Walaupun kontribusinya terhadap GDP hanya sekitar 21,1 persen (tahun 1988), namun peranannya terhadap penyerapan tenaga kerja masih sekitar 55,6 persen. Pada akhir Pelita V sektor pertanian diharapkan dapat menyerap 42,6 juta tenaga kerja atau sekitar 49,9 persen dari total tenaga kerja yang terserap. Terhadap ekspor, sektor pertanian menyumbang sekitar 17,4 persen (tahun 1988) dari seluruh devisa yang diperoleh.

- 
- 1) Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional "Meningkatkan Fungsi Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat Untuk Menggerakkan Usaha Ekonomi Rakyat Dalam Rangka Pembangunan Daerah Sebagai Bagian dari Pembangunan Nasional", DPP GOLKAR, Bukit Tinggi, 10-12 Juni 1991.



Melihat peranannya seperti di atas, kemampuan sektor pertanian perlu terus ditingkatkan untuk mencapai suatu sektor yang tangguh. Ketangguhan sektor pertanian dicirikan oleh : (a) mampu memanfaatkan segala sumberdaya secara optimal, (b) mampu mengatasi segala hambatan dan tantangan yang dihadapi, (c) mampu menyesuaikan pola dan struktur produksi mengimbangi perubahan permintaan masyarakat dan perubahan teknologi, dan (d) mampu berperan positif dalam pembangunan wilayah, melalui peningkatan produksi, peningkatan pendapatan masyarakat, perluasan lapangan usaha, penyerapan tenaga kerja, serta perbaikan lingkungan hidup.

Dalam seluruh rangkaian pembangunan pertanian yang dilaksanakan, pengembangan produksi komoditas pertanian menempati posisi sentral. Pengembangan produksi ini diarahkan untuk mempertahankan swasembada pangan, meningkatkan volume ekspor, menyediakan bahan baku industri dan kebutuhan lain seperti bahan pakan ternak dan bibit. Dalam pengembangan setiap komoditas, dipakai wawasan agribisnis yang mana selain dicapainya peningkatan produksi, pendapatan petani juga diharapkan dapat meningkat.

Pengembangan agribisnis secara luas menyangkut juga pengembangan agro industri. Berkembangnya agro industri yang merupakan diversifikasi vertikal dari agribisnis diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah, memperluas kesempatan kerja, menganekaragamkan bahan pangan dan komoditas ekspor, serta meningkatkan pendapatan penduduk pedesaan.



Untuk mencapai sasaran pengembangan agribisnis dan agro industri di pedesaan, pengembangan teknologi yang tepat guna memegang peranan kunci. Selanjutna teknologi tersebut harus dapat disebarluaskan dan akhirnya diterapkan oleh petani di pedesaan.

Bertitik tolak dari argumen di atas, makalah ini bertujuan untuk membahas konsepsi pengembangan teknologi pertanian di pedesaan serta proses penerapannya. Pembahasan didahului dengan konsepsi pengembangan komoditas pertanian dan agro industri.

## II. PENGEMBANGAN KOMODITAS PERTANIAN DAN AGRO INDUSTRI

Seperti telah disebutkan terdahulu, pengembangan komoditas merupakan komponen pokok dalam pembangunan pertanian. Pengembangan tersebut menyangkut aspek kuantitas maupun kualitas. Kualitas produksi komoditas pertanian perlu terus ditingkatkan mengingat permintaannya yang semakin tinggi baik untuk konsumsi dalam negeri, kebutuhan bahan baku industri, bahan pakan ternak maupun untuk keperluan ekspor. Bersamaan dengan itu kualitasnya juga perlu terus diperbaiki sesuai dengan tuntutan pasar.

Berdasarkan orientasi pasarnya, komoditas pertanian diarahkan untuk memenuhi berbagai tujuan. Pertama, terutama beras, beberapa komoditas palawija dan hortikultura pengembangannya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sendiri sehingga tercapai swasembada. Kedua, beberapa komoditas seperti tanaman perkebunan diarahkan untuk keperluan ekspor.



Ketiga, sebagian komoditas pertanian juga dimaksudkan sebagai bahan baku industri. Hal ini terutama diprioritaskan untuk komoditas yang memiliki kaitan ke depan yang kuat.

Dikaitkan dengan pembangunan wilayah, pengembangan komoditas dan pembangunan pertanian pada umumnya diharapkan sebagai mesin penggerak pembangunan ekonomi di masing-masing wilayah. Pengembangan komoditas di suatu wilayah didasari oleh pertimbangan keunggulan komparatif sesuai dengan potensi fisik dan prasarana ekonomi yang telah berkembang di daerah tersebut. Pewilayahan komoditas tersebut menimbulkan terjadinya spesialisasi yang akhirnya mendorong aktivitas perdagangan antar wilayah. Dengan adanya spesialisasi produksi, penggunaan sumberdaya menjadi lebih efisien.

Dasar pembagian wilayah komoditas secara teknis adalah zona agro ekosistem. Berdasarkan konsep tersebut, setiap wilayah administratif dapat dibagi-bagi lagi ke dalam zona agro ekosistem yang lebih spesifik yaitu lahan sawah beririgasi, lahan sawah tadah hujan, lahan pasang surut/rawa, dan lahan kering. Untuk setiap zona tersebut, alternatif komoditas yang harus dikembangkan sudah lebih spesifik. Namun demikian azas skala ekonomi pada tingkat wilayah dalam pengembangan komoditas tersebut tetap diperhatikan.

Berkaitan dengan pewilayahan komoditas di atas, peranan pulau Jawa dalam menghasilkan produksi pangan masih relatif tinggi. Untuk padi, Jawa menyumbang produksi sebesar 61 persen, sementara untuk jagung, kedelai dan ubikayu masing-masing adalah



62,5 persen, 56,7 persen dan 62,7 persen. Dalam jangka panjang, ketergantungan terhadap produksi pangan di Jawa ini perlu dikurangi dengan mengembangkan prasarana dan teknologi di luar Jawa terutama untuk lahan pasang surut/rawa dan lahan kering.

Wawasan lain dalam pengembangan komoditas adalah bahwa produksi komoditas pertanian merupakan suatu sistem agribisnis. Dengan konsep ini, kegiatan produksi pertanian harus dipandang sebagai suatu kegiatan usaha yang mampu memberikan keuntungan dan pendapatan bagi pengelolanya (petani, nelayan atau pengusaha). Produksi komoditas juga harus dilakukan dengan memperhatikan azas efisiensi yang memungkinkan pengusaha mampu bersaing baik di dalam negeri maupun di pasaran internasional.

Dilihat dari aspek diversifikasi secara vertikal, pengembangan komoditas mencakup pula aspek agro industrinya. Kegiatan ini mengolah komoditas pertanian sebagai bahan baku menjadi bahan olahan jadi atau setengah jadi. Integrasi produksi komoditas pertanian dengan agro industri diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah, memperluas kesempatan kerja, menganekaragamkan bahan makanan dan produk ekspor dan akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kegiatan pemasaran dan pengolahan kedelai mampu meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja sebanyak masing-masing 20,9 persen, dan 36,7 persen di atas kegiatan produksi saja. Dilihat dari potensi permintaan, pengembangan agro industri juga menunjukkan prospek yang cerah terutama untuk pangan. Dengan meningkatnya pendapatan, permintaan bahan makanan



olahan semakin meningkat pula. Hal ini terjadi baik di pasar domestik maupun pasar internasional.

Agar bisa dilakukan dan dinikmati oleh penduduk pedesaan, perusahaan agro industri harus didorong untuk tumbuh di pedesaan dengan model industri rumah tangga. Dengan demikian, sebanyak mungkin penduduk pedesaan dapat terlibat tanpa melepaskan prinsip-prinsip efisiensi termasuk skala usaha. Untuk pertimbangan efisiensi, usaha industri rumah tangga tersebut bisa saja bernaung di bawah suatu perusahaan besar dengan model PIR atau yang sejenisnya.

Perkembangan agro industri yang berkelanjutan (sustainable) juga menuntut persyaratan-persyaratan tertentu pada sisi produksi pertanian sebagai bahan baku. Pertama, untuk menjamin jumlah bahan baku yang memenuhi suatu skala ekonomi, produksi bahan baku harus dilakukan dalam suatu hamparan yang terpadu. Kedua, kelanggengan produksi antar musim sedapat mungkin juga dipertahankan. Hal ini menuntut teknologi produksi maupun penyimpanan yang mampu menjaga kelanggengan tersebut.

### **III. KONSEPSI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN**

Keberhasilan pengembangan komoditas pertanian tidak dapat dilepaskan dari pengembangan teknologi. Dalam kaitan ini pentingnya kegiatan penelitian baik penelitian yang diarahkan untuk menghasilkan paket-paket teknologi, penelitian yang menghasilkan bahan untuk menyusun paket kebijaksanaan ataupun



penelitian yang menghasilkan informasi bagi pengembangan ilmu dan teknologi itu sendiri.

Penelitian dikatakan berhasil apabila hasil penelitian tersebut telah digunakan oleh masyarakat/pemerintah dan memberikan manfaat bagi pengguna hasil penelitian tersebut. Dalam hal ini hasil penelitian haruslah secara teknis dapat diterapkan, secara ekonomis menguntungkan secara sosial diterima masyarakat dan memberikan dampak minimum terhadap lingkungan. Penelitian dilaksanakan berdasarkan skala prioritas yang diarahkan untuk menunjang pembangunan pertanian.

Kondisi pertanian dan pedesaan yang bervariasi antar wilayah menuntut pemilihan dan perakitan teknologi yang sesuai dengan kondisi dan lingkungan setempat. Dalam kaitan ini perakitan teknologi haruslah bersifat tepat guna dalam arti paket teknologi yang mampu meningkatkan pemanfaatan, pengelolaan sumberdaya alam secara optimal, peningkatan produksi, mutu hasil dan meningkatkan nilai tambah. Untuk itu penerapan teknologi harus disesuaikan dengan kondisi agro ekosistem setempat.

Perakitan teknologi yang spesifik lokasi (agro ekosistem) dilakukan dengan pendekatan sistem usahatani. Dengan demikian paket yang direkomendasikan bersifat terpadu memperhatikan kaitan antar berbagai komponen dalam sistem usahatani yang unik. Hal ini juga menghindari kegagalan paket teknologi karena tidak sesuai atau bertentangan dengan tatanan sistem yang sudah mapan.



Kondisi pertanian dan pedesaan di Indonesia cenderung masih bersifat subsisten, tradisional dan berskala kecil. Oleh karenanya teknologi tepat guna tersebut harus merupakan suatu paket teknologi yang berciri skala kecil, mempunyai daya serap tenaga kerja besar dan memerlukan investasi yang relatif kecil.

Macam teknologi akan memberikan pengaruh terhadap proses produksi. Pengaruh tersebut dapat berupa : (a) teknologi yang meningkatkan produktifitas, (b) teknologi yang menghemat faktor produksi atau menurunkan faktor produksi, (c) teknologi yang dapat meningkatkan kualitas hasil, nilai tambah dan membuka peluang pasar baru, serta (d) rekayasa sosial yang berupa perangkat lunak sebagai penggerak kegiatan berproduksi dan penerapan teknologi, seperti pengorganisasian, kelembagaan dan pengelolaan.

Dalam penciptaan teknologi yang meningkatkan produktifitas, dirasakan pentingnya peningkatan kemampuan dan rekayasa genetik, dan teknologi budaya. Sebagai contoh pada komoditi padi penciptaan varietas unggul baru diperlukan untuk menghilangkan ketergantungan terhadap varietas-varietas tertentu. Pada palawija rakitan teknologi diperlukan untuk meningkatkan produktifitas komoditi, terutama komoditi-komoditi yang masih menggantungkan kepada impor seperti kedele.

Dalam rangka meningkatkan produktivitas tenaga kerja, teknologi mekanik juga perlu terus dikembangkan. Penerapannya sudah sangat mendesak terutama di daerah-daerah dengan intensitas tanam yang tinggi namun dihadapkan dengan kelangkaan tenaga



kerja. Untuk mengurangi dampak negatifnya terhadap kehilangan kesempatan kerja buruh tani, pengembangan teknologi mekanik ini masih perlu dilakukan secara selektif di beberapa daerah tertentu.

Tidak kalah pentingnya adalah penciptaan teknologi yang bersifat rekayasa sosial dalam menciptakan suatu sistim pengorganisasian, kelembagaan dan pengelolaan usahatani. Sistim pengelolaan seperti Insus, Supra Insus dan Opsus telah memperlihatkan hasilnya dalam merangsang produksi tanamanpangan. Di bidang perkebunan telah pula diberlakukan sistim Tebu Rakyat (TRI) dan PIR Bun.

Penerapan teknologi dan upaya peningkatan produksi haruslah pula memperhatikan azas-azas kelestarian lingkungan. Contoh yang jelas paket teknologi yang berwawasan lingkungan adalah Pemberantasan Hama Terpadu (PHT). Dalam pendekatan ini, pengganggu tanaman dapat dikurangi sekecil mungkin tanpa merusak kelestarian sumberdaya biotik.

Dari segi produksi, sektor pertanian akan terus dituntut untuk meningkatkannya. Dalam penyediaan lahan sebagian lahan kering menjadi kritis akibat pendayagunaan untuk tanaman semusim, sehingga perlunya untuk peningkatan upaya konservasi tanah dan air. Di sisi lain pemakaian input produksi yang tinggi seperti pada hortikultura mengingatkan kembali akan dampak terhadap kelestarian dan lingkungan. Pentingnya perhatian terhadap masalah kelestarian sumberdaya dan lingkungan akan dapat berpengaruh terhadap usaha-usaha peningkatan produksi baik di waktu sekarang maupun dimasa mendatang.



#### IV. STRATEGI ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN

##### Teknologi dan Penggunaannya

Walaupun masih perlu peningkatan, penelitian telah terbukti mampu menghasilkan paket teknologi yang potensial. Untuk bisa digunakan oleh petani dan pengguna lainnya, paket teknologi yang telah terakit perlu disebarluaskan. Keberhasilan proses alih teknologi akan menentukan sampai sejauhmana teknologi dapat mencapai sasarannya.

Untuk merumuskan langkah-langkah operasional alih teknologi, perlu pemahaman siapa pengguna teknologi. Secara umum pengguna teknologi terdiri atas petani/nelayan di pedesaan dan pengusaha besar di perkotaan. Petani dan nelayan sendiri mempunyai karakteristik yang bervariasi yang menentukan respon yang berbeda terhadap adopsi teknologi baru. Ini berarti bahwa penyediaan teknologi harus memperhatikan bukan hanya keragaman agro ekosistem tetapi juga keragaman karakteristik pengguna. Ada pendapat yang mengatakan bahwa teknologi sudah banyak yang tersedia, tetapi tidak sampai kepada pengguna. Hal ini menyangkut belum terpecahkannya masalah komunikasi antara peneliti dengan pengguna teknologi.

Masalah yang sering terjadi pula adalah bahwa teknologi yang dirakit tidak sesuai dengan kebutuhan. Hal ini menyangkut kelayakan teknologi, baik dari segi teknis maupun sosial-ekonomi. Ketiga kriteria kelayakan itu perlu selalu diperhatikan dalam tahap pengembangan suatu paket teknologi perumusan paket



teknologi yang terlalu umum akan memperlambat proses alih teknologi tersebut. Untuk mempercepat alih teknologi itu diperlukan mediator antara peneliti sebagai pencipta teknologi dengan pengguna teknologi dan didukung oleh kelembagaan yang terkait.

### Integrasi antara Penelitian, Penyuluhan dan Pengguna Teknologi

Paket teknologi yang dirumuskan lembaga penelitian ditujukan untuk mendukung program pembangunan pertanian. Oleh sebab itu, hasil penelitian harus segera disampaikan kepada pengguna, terutama petani dan nelayan. Namun demikian, sampai saat ini paket teknologi yang dihasilkan umumnya tidak segera dapat diadopsi petani yang berakibat pada terjadinya kesenjangan antara paket teknologi yang dihasilkan dengan paket yang diterapkan petani. Pada gilirannya berikutnya hal ini berakibat pada timbulnya kesenjangan produktivitas hasil ditingkat petani dan di lembaga penelitian.

Salah satu faktor penting yang diduga menyebabkan terjadinya hal tersebut adalah masih kurangnya keterpaduan kurang antara kegiatan penelitian dengan penyuluhan. Kekurangan keterpaduan itu bisa dilihat dari beberapa hal. Pertama, hasil penelitian umumnya disampaikan dalam bentuk tulisan ilmiah, sedangkan penyuluh memerlukan sumber informasi yang lebih mudah untuk dicerna. Kedua, kekurangan keterpaduan itu bisa juga dilihat dari segi relevansi antara teknologi yang diciptakan dengan kebutuhan pengguna.



Misalnya, teknologi yang diciptakan sering masih berupa komponen, sedangkan yang dibutuhkan oleh pengguna adalah paket teknologi untuk yang sesuai dengan agro ekosistem dan kemampuan petani/nelayan. Dari contoh-contoh ini dapat dirumuskan bahwa kegiatan pengembangan penelitian masih perlu ditingkatkan. Kegiatan pengembangan penelitian itu seyogyanya melibatkan kerjasama antara peneliti, penyuluh dan pengguna.

Melalui kerjasama tersebut peneliti akan memperoleh umpan balik dari penyuluh dan pengguna dalam merumuskan program penelitiannya. Dengan demikian diharapkan bahwa hasil penelitian itu akan sesuai dengan kebutuhan dan pada gilirannya proses alih teknologi itu akan berjalan lebih cepat. Pelembagaan kerjasama ini tentu memerlukan kesepakatan semua lembaga yang terkait.

Karena umumnya pengguna teknologi itu berada di daerah (pedesaan), maka secara logis kegiatan pengembangan penelitian sebagian besar harus berada di tingkat lokal (misalnya kabupaten). Hal ini menuntut agar semua institusi yang terkait di daerah harus mempunyai persepsi yang sama tentang urgensi kegiatan pengembangan penelitian itu dalam mendorong perekonomian daerah itu.

Beberapa langkah penting dalam pengembangan penelitian itu antara lain : (1) Identifikasi masalah kebutuhan teknologi pada berbagai agro ekosistem, (2) Mengevaluasi dan merekayasa hasil penelitian sesuai dengan kebutuhan lokal, (3) Penyebarluasan hasil penelitian, seperti publikasi, demonstrasi dan temu lapang, (4) Mencari bentuk kelembagaan untuk memperbaiki teknik penyampaian hasil penelitian.



## Faktor-faktor Pendorong Adopsi Teknologi

Masalah adopsi teknologi adalah masalah yang kompleks yang dipengaruhi oleh banyak faktor yang terkait satu dengan yang lain. Selain dipengaruhi faktor fisik dan sosial-ekonomi, juga dipengaruhi faktor psikologis, seperti tingkat kepercayaan tentang nilai tambah yang diperoleh dari penggunaan teknologi baru tersebut. Beberapa faktor penting yang diduga merupakan pendorong terhadap adopsi teknologi adalah sebagai berikut :

### (a) Kelembagaan

Seperti telah dikemukakan terdahulu bahwa banyak lembaga yang terlibat dalam alih teknologi itu. Oleh sebab itu dalam pelaksanaan alih teknologi itu diperlukan kesamaan persepsi dari semua lembaga yang terkait tentang urgensi penggunaan teknologi itu dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah itu. Selain itu, dengan adanya kesamaan persepsi tersebut, pada gilirannya akan muncul motivasi untuk bekerja demi kepentingan umum, tidak hanya kepentingan individu. Penekanan masalah itu begitu penting mengingat masyarakat Indonesia mempunyai kondisi sosial ekonomi yang beraneka ragam antar daerah.

### (b) Karakteristik teknologi

Hal penting yang ditonjolkan dari karakteristik teknologi ini adalah kelayakannya. Layak dalam arti teknis, ekonomi dan sosial. Jika salah satu dari unsur kelayakan ini tidak dipenuhi sulit diharapkan proses alih teknologi itu berjalan dengan cepat, bahkan tidak diadopsi sama sekali.



(c) Pengetahuan/ketrampilan pengguna

Petani, pengguna teknologi di pedesaan umumnya mempunyai pendidikan atau ketrampilan rendah. Oleh sebab itu perlu dilakukan penyuluhan, tidak hanya dalam hal pengetahuan cara menggunakan teknologi itu, tetapi juga dalam bidang lain yang terkait pada perekonomian rumah tangga. Hal ini penting untuk mendorong motivasi mereka dalam berusaha agar berorientasi komersial, bukan sub sistem.

(d) Pasar

Penggunaan teknologi akan meningkatkan produktivitas atau menghasilkan komoditi baru. Ini berarti bahwa agar dampak teknologi itu meningkatkan nilai tambah, diperlukan dukungan pasar yang efisien.

(e) Kredit

Umumnya petani/nelayan di Indonesia tergolong ekonomi lemah. Ini berarti bahwa agar mereka mampu meng-adopsi teknologi baru diperlukan tambahan modal kerja mereka. Biasanya penggunaan teknologi baru menuntut modal yang lebih besar dibandingkan dengan teknologi tradisional.



## V. PENUTUP

Untuk meningkatkan pendapatan petani dan memperluas kesempatan kerja di pedesaan, pengembangan komoditas pertanian memegang peranan kunci. Pengembangan tersebut dilakukan dalam kerangka pembangunan wilayah sesuai dengan keunggulan komparatif dari masing-masing wilayah tersebut.

Pengembangan komoditas di atas perlu diintegrasikan pula dengan kegiatan agro industri di pedesaan. Selain meningkatkan nilai tambah, kesempatan kerja dan pendapatan, peningkatan kegiatan tersebut juga sejalan dengan perkembangan pasar. Misalnya untuk pangan, permintaan bahan olahan semakin meningkat baik di dalam negeri maupun di pasar dunia.

Untuk mendukung pengembangan komoditas, teknologi dikembangkan dalam konteks sistem usahatani sesuai dengan kondisi agro ekosistem di masing-masing daerah. Paket teknologi yang dikembangkan juga perlu memperhatikan kelestarian lingkungan untuk mempertahankan sustainability dari sektor pertanian.

Selain proses perakitannya, proses alih teknologi dari peneliti ke pengguna juga perlu penyempurnaan. Untuk mempercepat proses alih teknologi tersebut perlu kesamaan persepsi diantara semua lembaga yang terkait tentang peranan pengembangan penelitian dalam mendorong peningkatan produksi pertanian. Kesamaan persepsi tersebut akhirnya harus tercermin dalam bentuk integrasi pihak peneliti, penyuluh dan pengguna dalam pengembangan penelitian. Kerjasama tersebut seyogyanya terjadi sampai di tingkat lokal (kabupaten atau propinsi).



**SAMBUTAN SEMINAR INDUSTRI MESIN DAN  
PERMESINAN AGRO-INDUSTRI MENJELANG LEPAS LANDAS**

Oleh :  
Sjarifudin Baharsjah

Departemen Pertanian  
1991





MENTERI MUDA PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SAMBUTAN MENTERI MUDA PERTANIAN PADA  
SEMINAR INDUSTRI MESIN  
DAN PERMESINAN AGRO-INDUSTRI MENJELANG LEPAS LANDAS  
7 NOVEMBER, 1991 DI JAKARTA**

**Saudara Menteri Perindustrian Yang Saya Hormati,  
Saudara Menteri Riset dan Teknologi Yang Saya Hormati,  
Saudara-Saudara Para Undangan Yang Berbahagia.**

**Assalamu'alaikum Warakhmatullahi Wabarakatuh,**

Selama dua hari ini, kita semua akan membahas peran industri alat dan mesin pertanian dalam acara Seminar Industri Mesin Pengolahan Hasil Pertanian dan Permesinan Agro-industri Menjelang Era Lepas Landas. Saya merasa gembira bahwa dalam Seminar ini turut serta berperan aktif berbagai pihak, pemerintah maupun swasta seperti asosiasi bidang perdagangan, pemroses, ataupun produsen. Hal ini sejalan dengan kebijaksanaan pemerintah untuk senantiasa melibatkan pihak swasta dalam pembinaan sistem industrialisasi alat dan mesin pertanian.

Dalam menentukan kebijaksanaan pengembangan alat dan mesin pertanian, seperti kebijaksanaan lainnya, kita tidak boleh terlepas dari arah pembangunan nasional kita yang sudah jelas tertuang dalam GBHN, yang merupakan bentuk operasional dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Apabila kita mengacu kepada GBHN, maka jelaslah bahwa dalam Pelita Kelima pembangunan jangka panjang Republik Indonesia ini dititikberatkan pada

---

<sup>1</sup> Disampaikan pada "Seminar Industri Mesin Pengolahan Hasil Pertanian dan Permesinan Agro-Industri Menjelang Lepas Landas", Tanggal 7-8 November 1991, di Jakarta.



pembangunan ekonomi dan sasaran utamanya adalah terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat dan tercapainya struktur ekonomi yang seimbang. Struktur ekonomi yang seimbang ini memacu pembangunan industri yang kuat, yang didukung oleh pertanian yang tangguh, untuk mencapai kemandirian dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam pada itu, pengalaman Bangkajang 25 tahun pertama telah memberikan pelajaran yang sangat sangat berharga bagi kita yang dapat dipelajari dari indikator-indikator perkembangan pembangunan sektor pertanian untuk dijadikan bahan pemikiran menyusun atau menentukan kebijaksanaan lebih lanjut. Sektor Agroindustri dalam struktur industri dan perekonomian di Indonesia peranannya makin penting. Sektor ini dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Berbagai kelompok agroindustri misalnya industri pengolahan tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan termasuk hasil samping dan limbahnya perlu didukung oleh industri mesin dan peralatan pra dan pasca panen. Ekspor komoditi hasil pertanian di Indonesia menunjukkan peningkatan dari tahun 1983 hingga tahun 1990. Kenyataan menunjukkan bahwa hasil ekspor pertanian tersebut baru sekitar 20 % yang merupakan produk olahan. Apabila komoditas tadi diolah lebih lanjut sebelum diekspor, baik menjadi bahan setengah jadi maupun barang jadi, tentunya hal ini akan meningkatkan devisa negara kita.

Untuk melaksanakan optimalisasi hasil olahan berkualitas ekspor tersebut, peranan pengembangan industri peralatan pengolahan dan permesinan agro-industri sangat menentukan. Tentu saja dalam hal ini tidak hanya terbatas pada peralatan mekanisasi pertanian saja, tetapi untuk seluruh kegiatan pembangunan. Dari sini kita dapat menarik pelajaran bahwa berbagai tingkat keberhasilan dan kendala-kendala yang menghambat proses pembangunan



tersebut yang untuk selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan menentukan kebijaksanaan Bangkajang 25 tahap kedua yang sudah mendekat ini. Dalam pembangunan ekonomi ini, masalah-masalah pertumbuhan, pemerataan dan stabilitas merupakan parameter yang menuntun kita ke arah tercapainya tujuan pembangunan itu sendiri.

Dampak dari pelaksanaan optimalisasi tersebut adalah bahwa penyebaran industri pengolahan hasil pertanian yang akan lebih luas ke daerah sumber bahan baku hasil pertanian, meningkatkan pendapatan personalia yang terlibat, baik sebagai petani penghasil, petani pengumpul maupun sebagai pengolah. Dengan demikian, akan menciptakan lapangan pekerjaan baru terutama pada tenaga kerja di luar pertanian yang memiliki kemampuan memproses/mengolah maupun yang bekerja di industri pengemasan hasil pertanian.

### **Hadirin Yang Saya Hormati.**

Proses pembangunan sektor pertanian pada masa mendatang akan berada dalam proses perubahan globalisasi. Hal ini sudah agak lama terasa, khususnya dengan perkembangan sistem informasi dunia. Karena itu proses perubahan yang cepat dan penuh persaingan yang terutama melanda kawasan lingkaran Pasifik ini harus sudah diantisipasi dalam menentukan kebijaksanaan, termasuk bidang pengembangan teknologi mekanisasi pertanian ini. Lingkungan strategi lain yang perlu dipertimbangkan adalah status dan dimensi petani/nelayan serta kelembagaan yang memerlukan upaya-upaya peningkatan yang khas di bidang kemampuan manajerial, ekonomi dan ketrampilan teknis lainnya.

Tantangan pembangunan pertanian yang masih relevan dalam Repelita V dan di masa-masa mendatang antara lain meliputi masalah : (1) mempertahankan dan memantapkan swasembada pangan serta meningkatkan produksi hasil pertanian lainnya, (2) meningkatkan produksi hasil-hasil pertanian untuk



menunjang industri, meningkatkan ekspor, dan substitusi impor, (3) menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, (4) menyempurnakan sarana dan hasil produksi, (5) ketenagakerjaan dan (6) kelembagaan. Oleh karena itu pengembangan alat dan mesin pertanian haruslah diarahkan untuk mendukung pemecahan hal-hal tersebut di atas.

Dengan memperhatikan kegiatan sektor pertanian, parameter pembangunan, serta lingkungan dan tantangan strategis tersebut, maka pembangunan pertanian masa mendatang akan lebih bercorak agroindustri atau industrialisasi pertanian yang mempersyaratkan efisiensi dan produktivitas tinggi untuk meningkatkan pendapatan petani serta menghasilkan suatu produk yang bermutu atau hasil yang lebih baik. Disinilah alat dan mesin pertanian diharapkan dapat berperan penting sebagai sistem pendukung.

### **Hadirin Yang Saya Hormati.**

Pengalaman dalam pengembangan alat dan mesin pertanian selama 40 tahun merupakan khasanah pelajaran yang tak ternilai harganya dalam membantu menatap kebijaksanaan pengembangan mekanisasi atau alat dan mesin pertanian dalam jangka panjang di masa yang akan datang. Dari sini pula tampak bahwa pengembangan mekanisasi atau alat dan mesin pertanian selalu erat terkait sebagai sistem pendukung terhadap pengembangan sektor pertanian. Jelaslah bahwa pengembangan alat dan mesin pertanian tidak dapat berdiri sendiri dan berjalan sendiri karena pada akhirnya keputusan-keputusan usaha tanilah yang memandu tingkat ketepatangunaan teknologi alat dan mesin pertanian mana yang perlu dikembangkan. Pada awal pengembangannya, perkebunan-perkebunan besarlah yang sudah memanfaatkan teknologi alat dan mesin pertanian dengan pertimbangan efisiensi ekonomis. Sedangkan di subsektor tanaman pangan penerapan alat dan mesin pertanian masih lebih banyak bersandar kepada



"industrial impact", ialah suatu proses dimana penggunaan alat dan mesin besar-besaran sebagai produk industri maju dapat menarik pertumbuhan sektor pertanian lebih cepat.

Kita sangat menyadari bahwa sebagian dari proses transfer teknologi mekanisasi pertanian yang selama ini sedang berlangsung, baru berjalan pada tingkat penggunaan fisik alat dan mesin pertanian tanpa melalui kajian-kajian yang lebih cermat. Masalah-masalah manajemen, sistem pendukung dan kelembagaan serta dinamika petani belum mendapatkan perhatian kita secara lebih mendalam. Demikian juga keterkaitan optimasi mekanisasi pertanian dengan kesempatan kerja, tenaga kerja pertanian dan tingkat pengupahan belum banyak dibahas secara terintegrasi dan menyeluruh dalam penerapan teori "industrial impact" tersebut.

Pada dasawarsa 1960-an dan awal 1970-an, Indonesia dihadapkan pada tantangan utama dalam pemenuhan bahan pangan (terutama beras) karena laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi. Kesempatan kerja yang merupakan pula masalah sosial ekonomi mulai terasa makin menghimpit kita. Peranan sektor pertanian masih menonjol dengan sumbangannya dalam PDB rata-rata masih di atas 40% dan kesempatan kerja di sektor pertanian di atas 60%. Pada masa itu nilai satu unit traktor kecil di tanah air kita setara dengan 20 ton gabah yang bila dibandingkan dengan di Jepang (negara pengekspor) nilai traktor yang sama hanya setara dengan 4 ton gabah.

Keadaan itu kini mulai berubah. Beberapa masalah utama yang dulu kita hadapi, sebagiannya telah berhasil kita atasi, namun sebagian lainnya masih tetap merupakan masalah. Sementara itu, dengan keberhasilan yang kita capai muncul pula masalah-masalah baru yang menuntut untuk segera pula kita pecahkan.



Beberapa pendekatan yang kita lakukan dalam memecahkan masalah tersebut mungkin masih relevan, tetapi beberapa diantaranya mungkin memerlukan modifikasi dan penyegaran.

Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Saudara-Saudara untuk melihat kembali bersama-sama beberapa masalah yang kita hadapi dan kesempatan-kesempatan yang harus kita yakini dalam pengembangan mekanisasi pertanian di masa mendatang. Bertitik tolak dari gambaran permasalahan tersebut selanjutnya saya berharap agar Saudara-Saudara nantinya dapat mendiskusikan bersama-sama, implikasi yang dapat kita petik dari pembahasan tersebut, khususnya bila dikaitkan dengan upaya kita dalam menunjang pengembangan kegiatan agribisnis di Indonesia menjelang era tinggal landas nanti.

## **1. Menggantikankah Atau Menciptakan Lapangan Kerja**

Dalam pandangan yang sangat mikro, memang terdapat derajat substitusi yang erat antara penggunaan alsin pertanian dengan tenaga kerja. Pandangan ini yang menjadi dasar kekhawatiran introduksi alsin di sektor pertanian. Namun baik melalui pandangan mikro maupun makro dapat ditunjukkan bahwa introduksi alsin juga mampu membuka kesempatan dalam On-farm dan Off-farm. Dalam kegiatan On-farm akan meningkatkan intensitas usahatani sehingga justeru dapat menciptakan keperluan tenaga kerja tambahan. Dalam kegiatan Off-farm menjadi terbuka kesempatan kegiatan baru baik untuk Usahatani maupun untuk Non-usahatani.

## **2. Menekan Biayakah Atau Menarik Permintaan**

Rendahnya tingkat upah di sektor pertanian merupakan proses interaksi penawaran dan permintaan tenaga kerja di sektor tersebut.



Apabila perubahan disisi penawaran yang lebih dominan maka introduksi alsin justeru akan memperberat masalah tingkat upah yang rendah sehingga menyebabkan exodus labor surplus keluar dari sektor pertanian. Apabila perubahan disisi permintaan yang lebih dominan maka telah terjadi suatu perubahan teknologi yang menuntut keperluan tenaga kerja yang lebih efisien dalam satuan waktu yang sama, sehingga introduksi alsin justeru akan memperbaiki tingkat upah. Dalam perjalanan kita membangun di sektor pertanian, telah banyak kita rasakan manfaat kehadiran teknologi baru di bidang pertanian, sehingga proses ini seharusnya kita kaitkan dengan peluang untuk meningkatkan introduksi alsin pertanian.

### **3. Pilihan Teknologi**

Implikasi pada butir kedua diatas menyebabkan introduksi alsin di suatu kawasan, dalam horizon waktu tertentu, dan dengan jenis-jenis alsin tertentu mutlak harus memperhatikan sumber-sumber yang menyebabkan tingkat upah rendah sebagaimana yang diuraikan pada butir 2 tersebut. Argumentasi inilah yang menyebabkan introduksi alsin di suatu kawasan harus bersifat selektif.

### **4. Dukungan Pelayanan**

Berkaitan dengan introduksi alsin pertanian maka teknologi yang dipilih harus memperhatikan indigenous knowledge dan keberadaan sumberdaya setempat. Misalnya ketersediaan suku-cadang dan bentuk-bentuk pelayanan jasa lainnya.



## 5. **Kemandirian Berusaha**

Salah satu masalah yang dihadapi oleh semua sektor adalah semakin mahalnya atau tingginya investasi untuk menciptakan lapangan kerja. Kegiatan introduksi alsin pertanian harus dapat diarahkan bukan saja untuk menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga membuka kesempatan kepada pemilik modal di pedesaan untuk menciptakan kegiatan usaha mandiri (self-employment) sehingga pada gilirannya secara tidak langsung akan dapat menciptakan tenaga kerja baru.

## 6. **Kecenderungan Usahatani Sampingan**

Gejala dan proses terbentuknya kegiatan Usahatani yang bersifat parttime farming ini tampaknya sedang dan sudah mulai terjadi di pulau Jawa. Parttime farming sebagai suatu kegiatan usaha tidak lagi mengandalkan pertanian sebagai basis usaha ekonomi mereka, namun tetapi tetap merupakan bagian integral dari sumber mata pencaharian petani. Dalam kaitan ini secara riil cara produktivitas petani sebenarnya dapat dikatakan lebih baik, karena pencurahan alokasi waktu untuk kegiatan berusaha tidak lagi semata-mata untuk kegiatan Usahatani saja.

## 7. **Pengendalian Kualitas**

Salah satu masalah mendasar yang dihadapi oleh sektor pertanian dalam memasuki era industrialisasi adalah perbaikan dan pengendalian kualitas produksi pertanian yang dihasilkan. Dalam hubungan ini introduksi alsin pertanian dalam proses pengolahan lanjut merupakan peluang penerapan teknologi baru yang harus dapat dimanfaatkan. Melalui pengolahan pasca panen, persyaratan yang diperlukan bagi



berkembangnya agribisnis yaitu tersedianya bahan baku pada waktu, mutu, dan standard yang diperlukan akan dapat dipenuhi. Disamping itu, dengan menerapkan alsin dalam pengolahan lanjut hasil-hasil pertanian oleh para petani maka sebagian dari nilai tambah yang tercipta tersebut akan dapat diraih oleh petani sendiri.

## **8. Perubahan Kelembagaan**

Perubahan kelembagaan mempunyai arti ganda. Di satu pihak perubahan kelembagaan terjadi sebagai konsekuensi dari introduksi alsin yang harus dapat diantisipasi dengan baik. Di pihak lain perubahan kelembagaan itu sendiri dapat pula merupakan motor penggerak bagi proses introduksi alsin di sektor pertanian. Termasuk dalam perubahan kelembagaan ini adalah sistem bagi-hasil, jasa penyediaan modal dan pelayanan lainnya.

## **9. Kualitas Sumberdaya Manusia**

Kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) merupakan salah satu kendala utama dalam penerapan mekanisasi pertanian. Upaya pendobrakannya harus mendapatkan perhatian kita bersama. Dalam pada itu, transformasi struktur perekonomian yang menyebabkan pergeseran dalam penyerapan tenaga kerja mensyaratkan keperluan untuk menangani secara lebih serius masalah kualitas SDM di sektor pertanian. Pelepasan tenaga kerja dari sektor pertanian dapat membawa dua akibat buruk yang tidak kita inginkan. Rendahnya kualitas angkatan kerja yang memilih tinggal disektor pertanian akan membawa akibat turunnya produktivitas di sektor tersebut. Rendahnya kualitas angkatan kerja yang akan meninggalkan sektor pertanian akan menyebabkan stagnasi kumulatif ke sektor informal yang



dapat menimbulkan kerawanan sosial yang setiap waktu dapat meledak apabila tidak ditangani dengan hati-hati.

## **10. Pengembangan Sektor Swasta**

Introduksi alsin pertanian akan mengundang partisipasi sektor swasta yang selama ini sedang mencari bentuk keterlibatannya dalam pembangunan pertanian di pedesaan. Keterlibatan yang paralel dengan introduksi alsin pertanian ini akan memperkuat keterkaitan kegiatan produksi pertanian dengan kegiatan lanjutannya sehingga terciptanya jalur yang lebih efisien antara kegiatan industri hulu dan hilir dapat memberikan nilai tambah yang juga turut dinikmati oleh para petani sebagai produsen.

## **11. Peran Pemerintah**

Pemerintah tetap mempunyai peran yang sangat vital terutama sekali dalam menciptakan kondisi yang menciptakan insentif ekonomi bagi berkembangnya mekanisasi pertanian di pedesaan. Meskipun kebijaksanaan yang ditempuh sebanyak mungkin di arahkan agar mekanisme kerjanya mengikuti mekanisme pasar, namun kebijaksanaan yang diformulasikan harus tetap dapat memungkinkan pemerintah melakukan pengendalian pembangunan pertanian ke arah yang diamanatkan di dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap Ke-II.

### **Saudara-Saudara Hadirin Yang Saya Hormati.**

Apabila kita perhatikan beberapa permasalahan dan kesempatan yang telah saya uraikan tadi, maka segera tampak bahwa kita memiliki begitu banyak peluang untuk menghadapi tantangan-tantangan yang mungkin akan kita jumpai



dalam era lepas landas nanti. Pada kesempatan yang sangat berharga ini saya mengajak Saudara-Saudara untuk merumuskan dengan arif dan bijaksana bagaimanakah kiranya kita dapat memanfaatkan peluang-peluang tersebut sedemikian rupa sehingga dapat kita tempatkan pengembangan industri mesin pengolahan hasil pertanian dan permesinan agroindustri dalam suatu keseluruhan sistem pembangunan nasional yang terpadu.

Akhirnya, sekali lagi saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang telah diberikan, dan mengucapkan selamat berseminar.

**Wassalamu'alaikum Warachmatullahi Wabarakatuh.**

**Menteri Muda Pertanian**



**Sjarifudin Baharsyah**



**KEBIJAKSANAAN PENGEMBANGAN AGRIBISNIS  
DI INDONESIA**

Oleh :  
**Sjarifudin Baharsjah**  
Menteri Muda Pertanian

**DISAMPAIKAN PADA  
SEMINAR DALAM RANGKA HUT KORPRI KE XX  
DAN HARI BHAKTI TRANSMIGRASI KE XLI  
16 DESEMBER 1991**



**KEBIJAKSANAAN PENGEMBANGAN AGRIBISNIS  
DI INDONESIA**

Oleh :  
**Sjarifudin Baharsjah**  
Menteri Muda Pertanian

**DISAMPAIKAN PADA  
SEMINAR DALAM RANGKA HUT KORPRI KE XX  
DAN HARI BHAKTI TRANSMIGRASI KE XLI  
16 DESEMBER 1991**



# KEBIJAKSANAAN PENGEMBANGAN AGRIBISNIS DI INDONESIA

## Pendahuluan

Dalam era Pelita V dewasa ini, pemerintah telah bertekad untuk menempatkan pengembangan sektor agribisnis pada posisi sentral didalam pembangunan pertanian dan pedesaan. Tekad tersebut tentu menuntut segala kemampuan sumberdaya yang ada untuk dapat menciptakan iklim yang kondusif. Penciptaan iklim yang kondusif untuk merangsang pengembangan sektor agribisnis pada hakekatnya merupakan dukungan agar kendala-kendala yang masih melekat pada sektor tersebut dapat segera diatasi.

Jika dilihat secara umum, banyak kendala yang masih melekat di dalam upaya pengembangan sektor agribisnis, yaitu antara lain skala usaha di dalam sistem produksi yang relatif sangat kecil, sehingga menimbulkan permasalahan di dalam pasca panennya; kuantitas dan kualitas bahan baku serta permasalahan di dalam pembentukan modal yang dirasakan masih sangat terbatas. Semua kendala tersebut jika dilihat dari sisi bisnis tidak dapat disangkal merupakan resiko yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan resiko bisnis di bidang lainnya. Oleh karena itu, tekad untuk mencapai harapan didalam pengembangan sektor agribisnis ini mutlak memerlukan keterampilan di dalam berbagai segi, baik produksi, pemasaran, pengolahan, permodalan maupun aspek-aspek yang berkaitan dengan distribusi. Ini semua pada prinsipnya berkaitan dengan masalah-masalah peningkatan teknologi dan kualitas sumberdaya manusia terutama di dalam aspek manajerial. Tersedianya teknologi yang tepat, potensi sumberdaya alam yang berkeunggulan komparatif serta kualitas sumberdaya manusia merupakan faktor kunci di dalam rangka mencapai keberhasilan pengembangan agribisnis.



## Peran Agribisnis Dalam Era Industrialisasi

Saya melihat setidaknya-tidaknya ada beberapa alasan keperluan untuk meletakkan harapan kita pada kegiatan agribisnis dalam pembangunan ekonomi nasional guna menyongsong era lapas landas.

Pertama, keharusan mencari sumber pertumbuhan ekonomi yang mampu memanfaatkan keterkaitan pertumbuhan antar sektor. Terlebih, kegiatan agribisnis dalam perekonomian nasional dinilai sebagai perekat bidang singgung antara sektor pertanian dengan sektor-sektor lainnya. Pada tingkat perekonomian nasional saat ini, pertumbuhan sektor pertanian tidak akan dapat dipercepat tanpa mengindahkan keterkaitan yang erat antara kegiatan produksi, pengolahan atau pabrikasi, dan pemasaran. Salah satu sebab mengapa alokasi penggunaan sumber daya nasional dalam meningkatkan nilai tambah komoditi ekspor pertanian tradisional masih belum optimal adalah di sebabkan keterbatasan dalam meraih kesempatan dan peluang pasar yang ada. Keterbatasan tersebut tidak akan dapat didobrak bilamana kegiatan disektor pertanian hanya berorientasi kepada kegiatan produksi saja.

Kedua, secara nasional terdapat kebutuhan yang cukup mendesak dalam menyiapkan lapangan kerja baru guna mengantisipasi tambahan jumlah angkatan kerja yang terus meningkat setiap tahunnya. Kegiatan agribisnis merupakan kegiatan "multi-faset" sebab keberadaannya pada berbagai tingkat memungkinkan pengembangannya sampai kedaerah pedesaan. Oleh karena itu, melalui rekayasa pengembangan yang tepat, kegiatan agribisnis berpotensi tinggi untuk menampung dan bahkan menciptakan lapangan kerja baru. Dalam hubungan ini, terdapat paling tidak dua tantangan. Kualitas surplus tenaga kerja yang meninggalkan sektor pertanian karena tertarik kepada aktifitas ekonomi yang memberikan arus pendapatan lebih baik harus dapat ditingkatkan. Pada saat yang sama, kualitas tenaga kerja yang memilih menetap di sektor pertanian pun harus pula



ditingkatkan apabila produktivitasnya diharapkan mampu bersaing dengan produktivitas tenaga kerja di sektor lain.

**Ketiga**, secara nasional juga terdapat kepentingan untuk menciptakan landasan yang kokoh bagi perluasan ekspor non migas yang berakar kepada keunggulan komparatif yang dimiliki. Dalam pada itu, penerobosan terhadap pasar dunia selama ini sangat terbatas disebabkan sebagian besar hasil-hasil pertanian nasional masih diekspor dalam bentuk barang mentah maupun setengah jadi. Sementara spektrum potensi permintaan pasar yang dapat diraih masih sangat terbuka bilamana hasil-hasil pertanian itu diekspor dalam bentuk olahan. Pemikiran untuk mengembangkan kegiatan agribisnis antara lain didasarkan kepada potensinya dalam meningkatkan nilai tambah produksi hasil-hasil pertanian nasional, bukan saja terbatas pada tingkat petani, tetapi juga sampai ketingkat perdagangan internasional.

**Keempat**, hal lain yang tidak kurang pentingnya adalah pangsa produsen bahan mentah, terutama sekali bagi petani dan pekebun dalam meraih pendapatan dari proses nilai tambah perlu diperbesar. Kebutuhan ini erat kaitannya dengan upaya untuk senantiasa memodernisasikan sektor pertanian agar dapat selalu bersaing dan mampu mengantisipasi setiap perkembangan yang terjadi di sektor lain.

**Kelima**, kegiatan agribisnis sangat mengandalkan keberadaan sumber daya alam pertanian yang memiliki karakteristik dasar sebagai sumber daya yang senantiasa dapat diperbaharui ("renewable resources"). Karakteristik itu merupakan modalitas yang penting ditonjolkan sebab dengan demikian kelangsungan kegiatan ekonominya senantiasa dapat dipertahankan, tanpa mengurangi keberadaan dan mutu sumber daya alam pertanian nasional.

Kelima alasan yang saya kemukakan tersebut memberikan gambaran kepada kita



kenapa peran kegiatan agribisnis mempunyai prospek yang sangat penting dalam menyumbangkan andilnya bagi pembangunan ekonomi nasional kita. Akan tetapi masalah yang saya kira paling mendasar yang perlu mendapatkan perhatian adalah bagaimana kita mengarahkan kegiatan agribisnis ini sesuai dengan tujuan yang diarahkan dalam GBHN.

### **Agribisnis Yang Ingin Dikembangkan**

Di dalam struktur perekonomian Indonesia dewasa ini, sektor agribisnis pada hakekatnya mempunyai spektrum yang sangat luas, yaitu dari usahatani yang dikelola oleh keluarga-keluarga dengan sumberdaya yang sangat terbatas, sampai dengan tingkatan perusahaan raksasa yang bersifat supranasional.

Luasnya spektrum pengembangan agribisnis tersebut pada dasarnya menghendaki untuk secara seksama senantiasa melakukan pilihan ("choice") dikaitkan dengan aspirasi bangsa. Aspirasi bangsa yang senantiasa dapat dijadikan pedoman di dalam arah pengembangan agribisnis tersebut adalah pelaksanaan dari apa yang dikandung dan disebutkan dalam UUD 1945 dan GBHN, serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari tujuan untuk menciptakan suatu struktur pertanian yang tangguh. Dalam hal ini, struktur pertanian yang tangguh mempunyai berbagai ciri, seperti mampu memanfaatkan semua sumberdaya potensial secara optimal, mampu mengatasi segala hambatan dan tantangan yang dihadapi, mampu menyesuaikan diri dalam pola dan struktur produksi terhadap perubahan baik teknologi maupun permintaan, serta mampu berperan positif di dalam pembangunan wilayah maupun nasional.

Pengembangan agribisnis dapat mencakup tiga aspek, yaitu : (1) Aspek Usaha Pertanian; (2) Aspek Produksi Penunjang Pengolahan Pertanian; dan (3) Aspek Sarana Jasa Penunjang. Dari ketiga aspek tersebut, Agribisnis ternyata mempunyai lingkup yang luas



karena tidak hanya mencakup bidang-bidang produksi saja, melainkan juga pasca produksi dan termasuk pula berbagai industri sarana serta penunjangnya.

Pengembangan Agribisnis diharapkan akan meningkatkan keterkaitan langsung antara produksi pertanian, pengolahan hasil dan penciptaan prasarana yang diperlukan. Selain ekstensif, hubungan langsung itu akan lebih menekankan pada spesifikasi penanganan sehingga dapat membantu perencanaan yang seimbang. Dengan berkembangnya agribisnis diharapkan akan mampu menaikkan prestise usaha tani menjadi setara dengan pelaksana di sektor lainnya.

Dengan pengembangan agroindustri yang merupakan bagian dari rantai agribisnis, kita tidak lagi cuma mampu mengekspor bahan mentah, melainkan dapat pula meningkatkan menjadi komoditas olahan. Melalui agroindustri akan dicapai suatu nilai tambah, yang tentunya akan berdampak terhadap penerimaan devisa dan peningkatan pendapatan petani.

Disisi lain, agro-industri merupakan usaha meningkatkan efisiensi sektor pertanian hingga menjadi kegiatan yang sangat produktif berkat berlangsungnya proses modernisasi pertanian. Kondisi ini akan memaksa kita untuk menumbuhkan spesialisasi keahlian dan ragam kegiatan pekerjaannya. Dengan kata lain, tenaga kerja akan mempunyai banyak ragam keahlian untuk produksi.

Dari uraian di atas, kita dapat membayangkan betapa besar "linkage" dari berkembangnya sektor agribisnis ini terhadap sektor-sektor ekonomi lainnya. Dan perkembangan ini tentunya perlu ditunjang oleh pelaku-pelaku ekonomi lainnya.

Apabila kita amati secara rinci, pada prinsipnya disamping petani, pelaku kegiatan agribisnis dapat diklasifikasikan sebagai berikut : (1) Koperasi; (2) BUMN; dan (3) Perusahaan Swasta. Koperasi sebagai soko guru ekonomi diharapkan mampu berperan aktif di dalam memperkuat perekonomian pada skala kecil dan usaha keluarga di desa, dengan



antara lain secara aktif membantu petani menyalurkan baik input maupun hasil produk serta juga di dalam memberikan bimbingan teknis. Sedangkan swasta, sebagai pelaku ekonomi lainnya perlu diberi tempat dan kesempatan pengembangannya di sektor agribisnis dalam upaya merangsang dan memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagai dinamisator dan stabilisator pembangunan, pemerintah perlu tetap mempertahankan dan menumbuh-suburkan BUMN sebagai badan-badan yang tidak hanya berfungsi sebagai agent development, penyerapan tenaga kerja, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Tugas utama kita adalah bagaimana menyelaraskan ketiga pelaku ekonomi tersebut sehingga sasaran pembangunan yang dirumuskan dalam Trilogi Pembangunan dapat dicapai tanpa ada yang dikorbankan antara satu dengan lainnya.

Dalam pada itu, jika dilihat dari waktu ke waktu, maka di dalam pembangunan pertanian dewasa ini memperlihatkan bahwa peran sektor swasta semakin meningkat. Hal ini selaras dengan kebijaksanaan pemerintah yang tercermin dari menurunnya porsi anggaran pemerintah dibandingkan porsi anggaran pembangunan yang bersumber dari swasta. Peningkatan peran sektor swasta tersebut perlu ditata sedemikian rupa agar dapat lebih memacu serta menumbuh-kembangkan sektor-sektor lainnya seperti koperasi, BUMN dan lainnya secara serasi, selaras dan seimbang. Kesemua ini, dalam banyak hal tentu sangat berkaitan dengan usaha-usaha peningkatan kualitas faktor sumberdaya manusia sebagai subyek sentral pada usaha-usaha pembangunan.

Dengan demikian, agribisnis yang ingin dikembangkan di Indonesia disamping diarahkan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani pada kedudukan yang sentral, juga diarahkan untuk meningkatkan keserasian dan keseimbangan antar pelaku ekonomi, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kesemuanya itu akhirnya akan memperkokoh stabilitas nasional.



## Tantangan dalam Pengembangan Agribisnis di Indonesia

### 1. *Masalah Transportasi/Prasarana Lainnya*

Sarana transportasi pada umumnya masih merupakan kendala utama bagi pengembangan agribisnis/agroindustri di wilayah pedesaan, khususnya di luar Jawa, walaupun pada akhir-akhir ini pemerintah mulai giat membangun prasarana fisik di wilayah tersebut. Kurangnya sarana transportasi dapat menyebabkan kontak antar daerah menjadi kurang begitu lancar. Kurang lancarnya kontak antar daerah dapat menyebabkan banyak komoditas pertanian tidak bisa dipasarkan pada waktu musim panen. Keadaan demikian sering kita jumpai pada daerah pemukiman di wilayah terasing.

### 2. *Masalah Pemasaran*

Kendala pasar yang sering kali membatasi upaya kita untuk menerobos pasaran internasional adalah eskalasi tarif yang dikenakan oleh banyak negara atas produk olahan yang kita ekspor. Untuk mengatasi hal tersebut, tidak boleh tidak kita harus mensukseskan perundingan GATT. Disamping itu, kita juga harus melakukan perundingan bilateral agar dapat memanfaatkan pasar-pasar yang dapat menyerap produk kita.

### 3. *Masalah Skala Usaha*

Kegiatan agribisnis menuntut prasyarat skala ekonomi tertentu. Ketersediaan bahan baku secara berkelanjutan dengan kualitas tertentu serta perlakuan lainnya menyebabkan dimensi skala ekonomi yang dimaksud mungkin berbeda sama sekali dengan konsep skala ekonomi dalam kegiatan produksi pertanian yang selama ini



telah kita kenal. Sebagai sumber pemasok bahan baku bagi kegiatan pengolahan selanjutnya, kegiatan tersebut memerlukan suatu rangkaian pengendalian mutu yang ketat karena dapat mempengaruhi efisiensi teknis dan ekonomis bagi keseluruhan kegiatan agribisnis. Pada saat ini proses produksi pertanian dinilai kurang efisien karena diusahakan dalam luasan lahan yang sempit (skala kecil). Beberapa upaya untuk membebaskan diri dari kendala ini adalah melalui pendekatan PIR, pendekatan kerja sama kelompok sehamparan seperti program INSUS dan SUPRA-INSUS, maupun pendekatan Bapak Angkat.

#### **4. Masalah Teknologi**

Kegiatan agribisnis/agroindustri sangat memerlukan dukungan teknologi produksi dan teknologi industri yang lebih maju. Belum dikuasainya teknologi dalam industri hilir berbagai komoditi sangat menghambat perkembangan agribisnis/agroindustri di Indonesia, khususnya dalam peningkatan diversifikasi produk dan peningkatan nilai tambah. Ioteknologi dan bioproses merupakan jalur cepat yang perlu kita tempuh guna memacu pertumbuhan sektor pertanian di masa yang akan datang. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kemampuan kita dalam penelitian dan pengembangan di bidang bioteknologi ini perlu kita pacu apabila kegiatan agribisnis/agroindustri ingin kita tumbuh-kembangkan.

#### **5. Masalah Kelembagaan**

Kegiatan agribisnis menuntut bentuk usaha dan unit organisasi perusahaan yang spesifik serta kompatibel dengan jenis komoditas yang diusahakan. Salah satu sebab mengapa kegiatan agribisnis di Indonesia belum mencapai performansi yang optimal adalah karena pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan kepada suatu unit



organisasi yang secara teknis manajerial lebih banyak berorientasi kepada aspek produksi. Organisasi perusahaan yang dikembangkan seyogyanya harus mempunyai kemampuan menopang bukan saja kegiatan produksi dan pengolahan, tetapi juga kemampuan dalam menunjang upaya penetrasi pasar khususnya bagi produk-produk industri hilir. Untuk itu organisasi perusahaan perlu juga ditopang dengan keahlian dalam negosiasi dengan mitra usaha yang mempunyai reputasi internasional dan pangsa pasar dunia yang mampan.

Masalah lainnya yang cukup menonjol adalah belum berfungsinya KUD sebagai mata rantai kegiatan ekonomi di pedesaan. Kurang efektifnya fungsi KUD dapat menyebabkan "bargaining position" kelompok tani melemah khususnya dalam menghadapi hubungan kerjasama dengan perusahaan swasta maupun BUMN sebagai mitra usahanya. Bagi perusahaan swasta/BUMN, kurang berfungsinya KUD akan berpengaruh terhadap kelancaran pengadaan bahan baku, pemasaran dan pembinaan kelompok tani. Oleh karena itu, adalah kewajiban kita bersama untuk terus berupaya meningkatkan fungsi KUD sebagai motor penggerak perekonomian di wilayah pedesaan.

## **6. Masalah Tenaga Profesional**

Kendala yang pada saat ini dianggap paling relevan dan menyangkut langsung terhadap kemajuan agribisnis di Indonesia adalah keterbatasan tenaga/manajer profesional. Harus kita akui bahwa sampai saat ini jumlah sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan manajerial yang kompatibel dengan kebutuhan kegiatan agribisnis masih sangat terbatas. Kebutuhan tenaga profesional dengan kualitas yang diperlukan kini sangat dirasakan oleh kita semua. Salah satu bukti empiris yang mendukung kenyataan di atas adalah dengan semakin berkembangnya lembaga-



lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta yang berupaya memberikan pelayanan bagi penyiapan tenaga-tenaga manajer profesional pada berbagai tingkat keahlian yang dibutuhkan.

## **7. Masalah Finansial**

Tersedianya lembaga finansial masih merupakan kendala utama dalam menunjang pengembangan agribisnis di wilayah pedesaan. Apabila dikaji secara seksama, ternyata sampai saat ini penanaman modal di sektor pertanian kurang diminati pihak swasta. Faktor utama mengapa bisnis di sektor pertanian kurang diminati oleh pihak swasta adalah karena investasi di sektor ini pada umumnya dinilai memiliki resiko yang cukup tinggi bila dibandingkan dengan investasi di sektor manufaktur ataupun jasa. Resiko tidak hanya muncul karena gejolak harga, akan tetapi juga dari proses produksi yang masih tergantung pada iklim. Teknologi memang telah banyak membantu mengurangi resiko itu, terutama dalam perlindungan terhadap hama dan penyakit, namun iklim tetap merupakan faktor ekstrim yang sulit dikendalikan.

## **Strategi Dasar Pengembangan Agribisnis**

Seperti diungkapkan di atas bahwa kegiatan agribisnis, dengan karakteristik yang dimilikinya, mempunyai prospek yang cerah, baik sebagai sumber pertumbuhan baru bagi perekonomian nasional maupun sebagai wahana penyerap tenaga kerja. Untuk meraih manfaat optimal dari kegiatan ini, Ada beberapa strategi dasar yang perlu ditempuh oleh pemerintah. Pertama, merubah pola pikir konvensional para petani yang senantiasa berorientasi pada produksi ke arah pola pikir yang berorientasi kepada bisnis, Kedua, sedapat mungkin diupayakan untuk melonggarkan semua kendala yang telah diuraikan



sebelumnya. Tersedianya fasilitas infra-struktur yang memadai seperti jalan penghubung, jalan poros, dan jalan desa merupakan prasyarat utama dalam memacu pengembangan agrobisnis/agroindustri di pedesaan. Untuk itu, pembangunan prasarana fisik perlu terus ditingkatkan khususnya untuk wilayah Indonesia Bagian Timur (IBT) dan wilayah remote lainnya.

Ketiga, sangat diperlukan adanya lembaga finansial yang ditunjang oleh iklim ekonomi yang kondusif, merupakan strategi dasar yang dapat memacu keberhasilan pengembangan agribisnis di Indonesia, karena sektor ini dapat berperan sebagai pelancar mata rantai kegiatan sektor produksi dengan sektor industri dan jasa. Dengan berkembangnya sistem kelembagaan finansial tersebut di atas, maka roda pembangunan pertanian di Indonesia benar-benar akan berjalan selaras dengan pembangunan sektor industri. Untuk itu, tersedianya lembaga finansial yang dapat dijangkau oleh para petani dan pelaku ekonomi lainnya di pedesaan. kemampuan dan peranan koperasi sebagai ujung tombak atau motor penggerak ekonomi pedesaan perlu terus ditingkatkan. Oleh karenanya, keberadaan tenaga-tenaga profesional untuk menangani pengelolaan koperasi di wilayah ini mutlak dibutuhkan.

Sejalan dengan kebijaksanaan diatas, sudah waktunya bagi kita untuk merumuskan suatu kebijaksanaan finansial yang menyeluruh, sehingga : (a) Kredit yang dibutuhkan oleh para petani/nelayan mudah didapat, sederhana prosedurnya, lokasinya mudah dijangkau; (b) Jangka waktu kredit seyogyanya disesuaikan dengan kemampuan para petani/nelayan dan pelaku ekonomi lainnya; (c) Lembaga finansial, seperti BPR, sebaiknya harus merupakan lembaga yang mantap, sehingga dapat dipercaya oleh para petani/nelayan dan pelaku ekonomi lainnya di pedesaan; dan (d) Dalam penyediaan kredit untuk masyarakat tani/nelayan perlu dikembangkan pendekatan yang lebih responsif terhadap permintaan.



Keempat, keberhasilan pengembangan agribisnis tidak dapat dilepaskan dari tersedianya teknologi tepat guna. Untuk itu, kegiatan penelitian, baik penelitian yang diarahkan untuk menghasilkan paket-paket teknologi, penelitian yang menghasilkan bahan untuk menyusun paket kebijaksanaan ataupun penelitian yang menghasilkan informasi bagi pengembangan ilmu dan teknologi itu sendiri, perlu terus ditingkatkan.

Kondisi pertanian dan pedesaan yang bervariasi menurut wilayah menuntut pemilihan dan perakitan teknologi yang sesuai dengan kondisi dan lingkungan setempat. Dalam kaitan ini perakitan teknologi haruslah bersifat tepat guna dalam arti paket teknologi yang mampu meningkatkan pemanfaatan, pengelolaan sumberdaya alam secara optimal, peningkatan produksi, mutu hasil dan meningkatkan nilai tambah. Untuk itu penerapan teknologi harus disesuaikan dengan kondisi agro ekosistem setempat. Untuk dapat lebih menyentuh petani, maka penelitian terapan perlu mulai dikembangkan. Disamping itu penyuluhan perlu menjadi bagian yang menyatu dari kegiatan penelitian.

Penguasaan teknologi untuk menopang pengembangan kegiatan agribisnis/ agroindustri dapat ditempuh melalui: (1) Kerjasama patungan (Joint venture) dengan swasta asing yang telah menguasai teknologi tertentu. Dengan cara ini, secara bertahap akan terjadi alih teknologi dari negara maju ke Indonesia; (2) Mendidik tenaga ahli kita ke luar negeri, khususnya untuk bidang keahlian yang belum kita punyai; (3) Membeli lisensi dari luar. Dengan cara ini transfer teknologi dari luar ke Indonesia akan terjamin walaupun cukup mahal harganya.

Kelima, strategi dasar lainnya yang perlu ditempuh oleh pemerintah, agar pengembangan agribisnis di Indonesia dapat memberikan nilai tambah yang lebih kepada petani, adalah perlu diupayakan pembinaan kelembagaan usaha tani secara kontinyu (mulai dari tingkat kelompok tani sampai ketingkat KUD) agar ia mampu berperan



menjembatani dan memperjuangkan kepentingan petani, khususnya dalam menghadapi sektor swasta/BUMN sebagai mitra usaha.

Semua strategi dasar tersebut di atas akan mencapai tingkat yang optimal apabila kita mampu mendorong keterlibatan sektor swasta/BUMN secara dini didalam pengembangan agribisnis di pedesaan. Untuk itu, kebijaksanaan deregulasi di sektor moneter dan sektor riil perlu terus ditingkatkan disamping untuk meningkatkan daya saing, menarik investor dan juga diharapkan dapat meningkatkan keterkaitan agro-industri dengan kegiatan sektor lainnya.

Persyaratan utama yang harus diperhatikan agar hubungan kerja antara swasta/BUMN dengan para petani/nelayan berjalan serasi dan saling menguntungkan adalah sebagai berikut : (1) perlu dikembangkan aturan main yang transparan; (2) adanya kejelasan serta kepastian dalam pembagian keuntungan maupun dalam pembagian resiko; dan (3) kerja sama tersebut harus mampu mendorong petani/nelayan untuk lebih mandiri. Hubungan dua arah yang serasi dan saling menguntungkan ini diharapkan akan mampu mendorong kegiatan agribisnis/agroindustri ke tingkat yang optimal.



## Penutup

Mengingat pentingnya pengembangan agribisnis ini, pemerintah bertekad menempatkan pengembangan sektor agribisnis pada posisi sentral di dalam pengembangan pertanian dan pedesaan termasuk didalamnya daerah transmigrasi.

Untuk daerah transmigrasi, agar pengembangan agribisnis mampu memberikan hasil yang optimal, maka pengembangan sektor ini perlu diikuti dengan strategi pengembangan teknologi yang sesuai dengan kondisi dan sumberdaya setempat dengan ditopang oleh adanya sarana infra struktur yang memadai.

Untuk menunjang strategi tersebut, maka diperlukan adanya perubahan dari pola pikir konvensional yang senantiasa berorientasi pada produksi ke arah pola pikir yang berorientasi kepada bisnis. Disamping itu perlu dilakukan langkah-langkah konkrit untuk lebih mendapatkan unit pemukiman transmigrasi sebagai wilayah produksi yang dapat dikaitkan dengan keberadaan pasar. Hal ini akan memungkinkan terjadinya aktivitas ekonomi yang lebih intensif dan dinamis di wilayah tersebut yang pada gilirannya diharapkan akan memberikan dampak yang positif terhadap pendapatan petani trans dan masyarakat sekitarnya.

Agar pengembangan agribisnis di unit pemukiman transmigrasi dapat memberikan nilai tambah kepada petani, perlu diupayakan pembinaan kelembagaan usaha tani (mulai dari tingkat kelompok sampai ketingkat KUD) yang mampu menjembatani dan memperjuangkan kepentingan petani didalam rangkaian kegiatan agribisnis tersebut khususnya dalam menghadapi sektor swasta/BUMN sebagai mitra usaha.

Semua strategi tersebut di atas akan terlaksana dengan baik apabila kita mampu mendorong keterlibatan sektor swasta/BUMN secara dini didalam pengembangan agribisnis di unit pemukiman transmigrasi ini.

